



**PEMERINTAH KOTA BIMA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)**

Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Telp/Fax. (0374) 44088 Raba-Bima

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2022  
(LKIP)**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)



**TAHUN ANGGARAN  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Bima Tahun 2022 (alokasi anggaran tahun 2023) telah dapat terselesaikan. LKIP BAPPEDA LITBANG sebagai hasil akhir proses penyusunan laporan kinerja yang memuat akuntabilitas kinerja dan keuangan serta hasil akhir kegiatan dan capaian program yang dapat dicapai oleh satu atau lebih kegiatan yang bermuara pada sasaran program yang telah direncanakan.

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP ini dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2018-2023 sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2022 berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RENSTRA BAPPEDA LITBANG Kota Bima tahun 2018 - 2023. Hasil penilaian capaian kinerja pada tahun 2022 yang telah dievaluasi akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja BAPPEDA LITBANG Kota Bima di tahun selanjutnya.

Penyusunan laporan kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin. Walaupun demikian, disadari bahwa laporan yang telah disusun tidak terlepas dari kekurangan sehingga terus harus dilakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya, semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi evaluasi kinerja BAPPEDA LITBANG Kota Bima khususnya dan kegiatan Pembangunan di Kota Bima pada umumnya.

Raba-Bima, Januari 2023

Kepala BAPPEDA,



**Drs. H. MUHAMMAD FAKHRUNRAJI, ME**  
Perwakilan Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196808281992031010

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai lembaga teknis perencanaan daerah Pemerintah Kota Bima, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders). Oleh karenanya langkah strategis perlu segera diwujudkan dan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan operasional yang nyata, produktif, efisien, efektif dan responsif dalam memecahkan berbagai permasalahan serta tantangan di Kota Bima.

Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kota Bima diperlukan adanya Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah guna lebih mengetahui kemampuan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Bappeda Kota Bima dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat kekurangan-kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan di masa mendatang. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi kekurangan serta keberhasilan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Bima dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara profesional dan proporsional., secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja sesuai dengan Renstra Bappeda Litbang tahun 2018 - 2023.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Litbang Kota Bima di tahun 2022 adalah Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang diukur dengan Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah yang ditargetkan diangka 78.97 dan dapat direalisasikan sebesar 98,36 atau capaian kinerja sebesar 124.55% dan capaian ini dikategorikan sangat berhasil karena tingkat keberhasilan melampaui 100%. Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari perencanaan yang terstruktur dan sistematis dalam pengimplementasian strategi pencapaian sasaran strategis perangkat Bappeda Litbang serta dukungan, komitmen, konsistensi dan kerja keras semua unsur sumberdaya yang ada di Bappeda Litbang Kota Bima.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Bima pada umumnya dan Bappeda Litbang Kota Bima khususnya. Untuk itu Bappeda Litbang Kota Bima berupaya meningkatkan pencapaian kinerjanya dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Bima.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Kedudukan Organisasi.....	2
1.2.1 Susunan Organisasi.....	2
1.2.2 Tugas dan Fungsi.....	4
1.3 Sumber Daya Manusia.....	10
1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana .....	13
1.5 Keuangan.....	15
1.6 Isu Strategis yang dihadapi .....	15
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>19</b>
2.1 Perencanaan Strategis.....	19
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kota Bima 2018- 2023 .....	19
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..	30
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .....	32
2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	37
2.3 Perjanjian Kinerja.....	38
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>45</b>
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	46
3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan .....	46
3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	46
3.1.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran .....	101
3.1.4 Analisa Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	111
3.2 Analisis Penyebab Kebersihan/Kegagalan .....	115
3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	116
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	125
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	11
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	12
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering.....	12
Tabel 1.4	Daftar Inventaris Bappeda Litbang Tahun 2022 .....	14
Tabel 2.1	Target Akhir RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023.....	20
Tabel 2.2	Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang .....	31
Tabel 2.3	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022 .....	34
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama BAPPEDA LITBANG Kota Bima .....	38
Tabel 2.5	Penetapan Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022 .....	39
Tabel 2.6	Penetapan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2022 .....	39
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	46
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022 .....	46
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022 .....	47
Tabel 3.4	Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah .....	48
Tabel 3.5	Program Prioritas Pendukung Capaian per Sektor .....	51
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021-2022 .....	65
Tabel 3.7	Program Prioritas Pendukung Capaian per Sektor .....	82
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2022 dibandingkan capaian tahun sebelumnya .....	101
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Program Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2022 ..	101
Tabel 3.10	Analisis Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	111
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja pencapaian Sasaran Tahun 2022 ..	116
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2022 .....	118
Tabel 3.13	Analisis Efisiensi .....	119
Tabel 3.14	Analisis Efisiensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Litbang.....	120
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda Tahun 2022 .....	126
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Belanja Non Gaji Bappeda Tahun 2022 .....	127

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan .....	11
Diagram 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan .....	12
Diagram 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Eselonering.....	13

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022.....	4
Gambar 1.2	Permasalahan dan Isu Strategis dalam pelaksanaan tugas Bappeda Litbang pada tahun 2022 .....	16
Gambar 2.1	Strategi yang mencakup program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2022 .....	33



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

### 1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Litbang Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, masing-masing Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kemudian setiap OPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Bima 2018 - 2023, Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022 serta dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA) Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2022.

Melalui penyajian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022 ini diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja terukur ditargetkan dan telah dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Bima.
2. Mendorong Bappeda Litbang Kota Bima untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Litbang Kota Bima dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan seluruh stakeholder terkait terhadap kinerja Bappeda Litbang Kota Bima yang akuntabel dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung perwujudan visi dan misi pembangunan daerah Kota Bima.

## **1.2. Kedudukan Organisasi**

### **1.2.1. Susunan Organisasi**

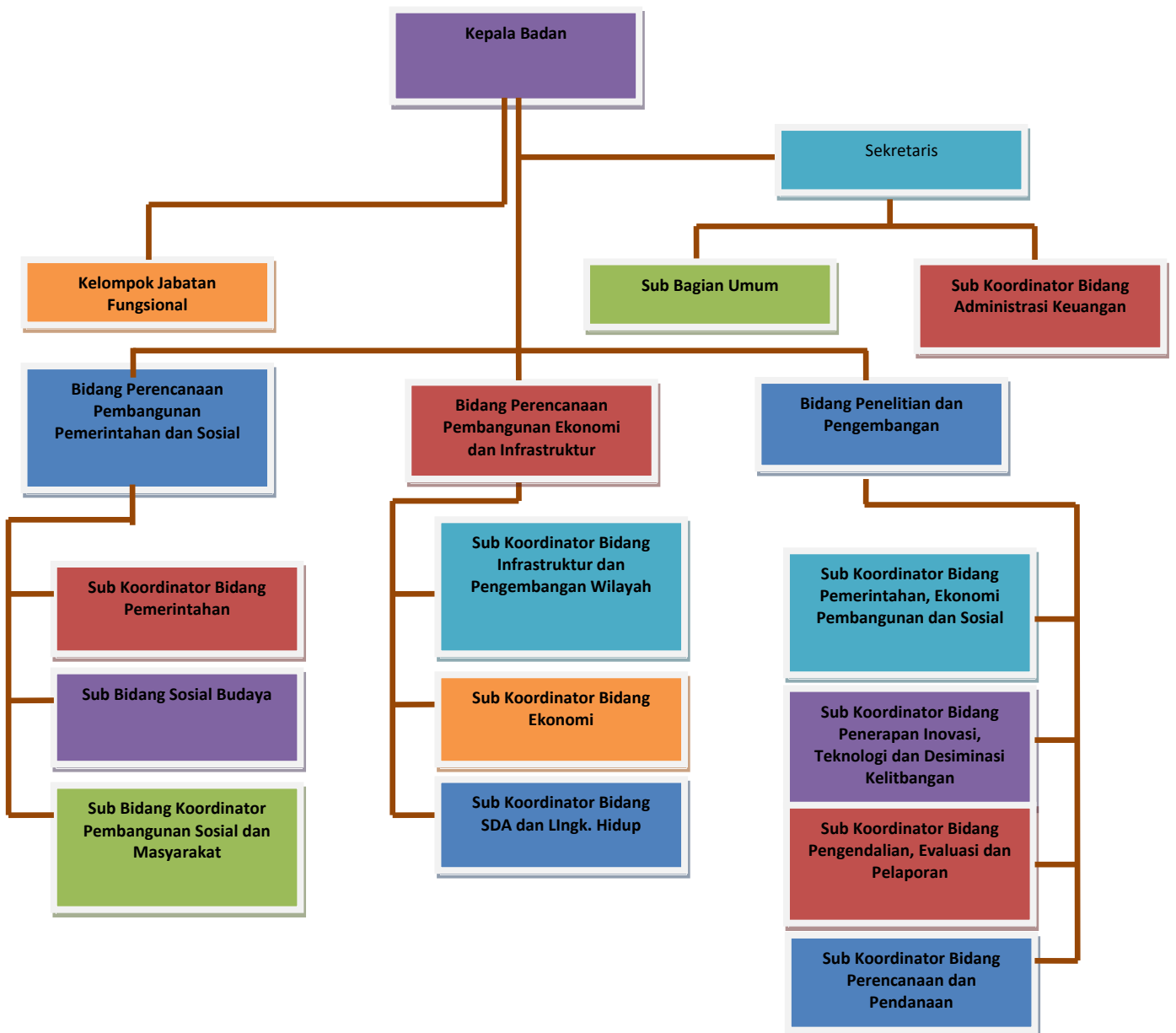
Bappeda Litbang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima serta Peraturan Walikota Bima nomor 59 tahun 2016. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Koordinator Bagian Administrasi Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Bidang Pemerintahan
  - b. Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
  - b. Sub Koordinator Bidang Ekonomi
  - c. Sub Koordinator Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Sosial
  - b. Sub Koordinator Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan
  - c. Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
  - d. Sub Koordinator Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Bagan Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Bima adalah sebagaimana ditunjukkan berikut ini.

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022



Sumber: Peraturan Walikota Bima nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

### 1.2.2. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun

antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan tugas pokok Bappeda Litbang adalah menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Kepala Badan mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi;
2. Penetapan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan;
3. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
4. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan dan percepatan pembangunan Daerah;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
6. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah secara makro;
7. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPJ);
8. Pelaksanaan program kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peningkatan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, Kerjasama Pembangunan, Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Prasana Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Penyiapan potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah serta pengembangan peraturan Perundang-undangan;
9. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan petunjuk teknis pembangunan daerah, pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan serta

wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah serta keserasian pembangunan daerah sesuai manajemen pengembangan wilayah dan kawasan daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah;

10. Pengoordinasian kegiatan Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **A. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- 2) Pengelolaan urusan keuangan;
- 3) Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- 4) Pengelolaan urusan ASN; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi:

##### **a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### ***B. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial***

Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
- 2) Verifikasi Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang pemerintahan dan sosial;
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan sosial;
- 7) Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;



- 8) Pengekoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- 9) Pengekoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- 10) Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- 11) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur**

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Infrastruktur, Ekonomi dan SDA serta penilaian atas pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. Pengekoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, PJMD, dan RKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- b. Pelaksanaan verifikasi Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- c. Pengekoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- d. Pengekoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- e. Pengekoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- f. Pengekoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan

- Ekonomi;
- g. Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - h. Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - i. Pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - j. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - k. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi; dan
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

*D. Bidang Penelitian dan Pengembangan*

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan, merumuskan kebijakan, mensosialisasikan, mengevaluasi, monitoring dan menyampaikan laporan di bidang pemerintahan umum dan Pengkajian Peraturan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Penerapan dan inovasi teknologi serta Diseminasi kelitbang. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbang;
- 2) Penyusunan dokumen pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan di

- bidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi, serta Desiminasi Kelitbangan;
- 3) Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Pemerintahan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
  - 4) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, di bidang sosial dan kependudukan, di bidang ekonomi dan pembangunan, di bidang penerapan dan Inovasi Teknologi; dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### **1.3 Sumber Daya Manusia**

Bappeda litbang Kota Bima didukung oleh 35 orang Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki ketrampilan yang memadai dan menjadi potensi sumberdaya manusia dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

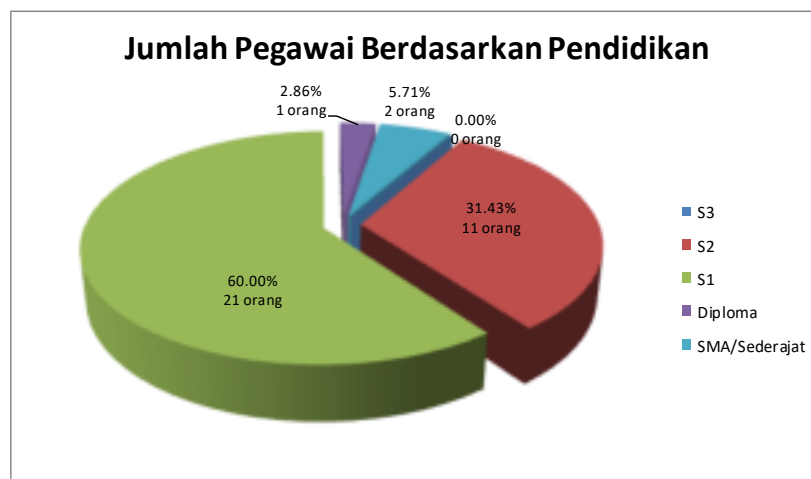
Sumber daya manusia Bappeda Litbang Kota Bima hingga akhir tahun 2022, digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S3	-	-
2.	S2	11	31.43%
3.	S1	21	60.00%
4.	Diploma 3	1	2.86%
5.	SMA / sederajat	2	5.71%
Total		35	100%

Sumber: DUK Bappeda Litbang Tahun 2022

Diagram tabel 1.1.  
Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan



*Olah data Bappeda Litbang Tahun 2022*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, sumber daya manusia aparatur berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 21 orang (60%) adalah Strata 1, selanjutnya 11 orang (31,43%) memiliki tingkat pendidikan Strata 2, 1 orang berpendidikan D.III (2,86%) dan 2 orang SMA/ sederajat atau 5,71%.

Selanjutnya, berdasarkan kualifikasi golongan, pegawai Bappeda Litbang Kota Bima terdiri dari 28 orang Golongan III atau sekitar 80%, 5 orang dengan Golongan IV atau 14,29%, dan golongan II sebanyak 2 orang atau 5,71%. Walaupun berdasarkan jenjang pendidikan, golongan dan pangkat, sebagian besar aparatur Bappeda Litbang Kota Bima cukup memadai, namun mengingat tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan cenderung kompleks, maka masih

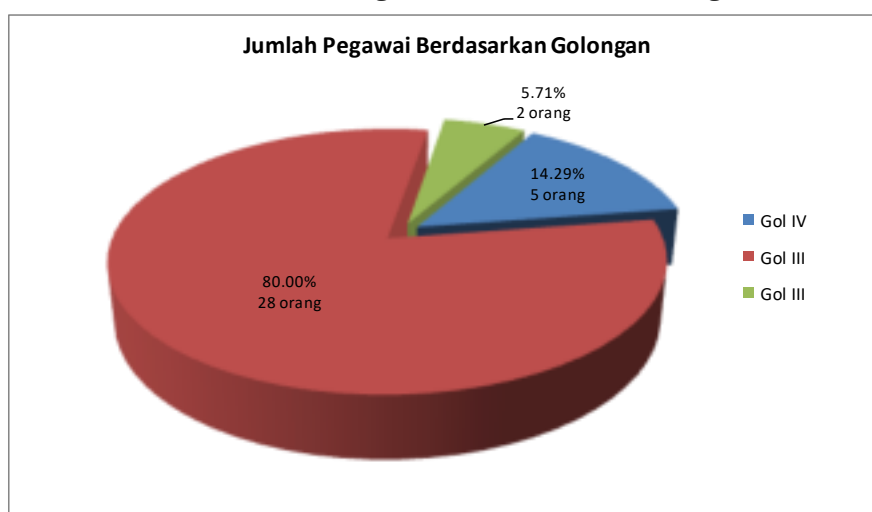
dibutuhkan peningkatan keterampilan khusus perencana guna meningkatkan sumber daya aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak yang relevan. Gambaran jumlah pegawai berdasarkan golongan dan eselon dapat dilihat pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 berikut ini.

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	5	14.29%
2.	Golongan III	28	80.00%
3.	Golongan II	2	5.71%
Total		35	100%

Sumber : DUK Bappeda Litbang Tahun 2022

Diagram tabel 1.2.  
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

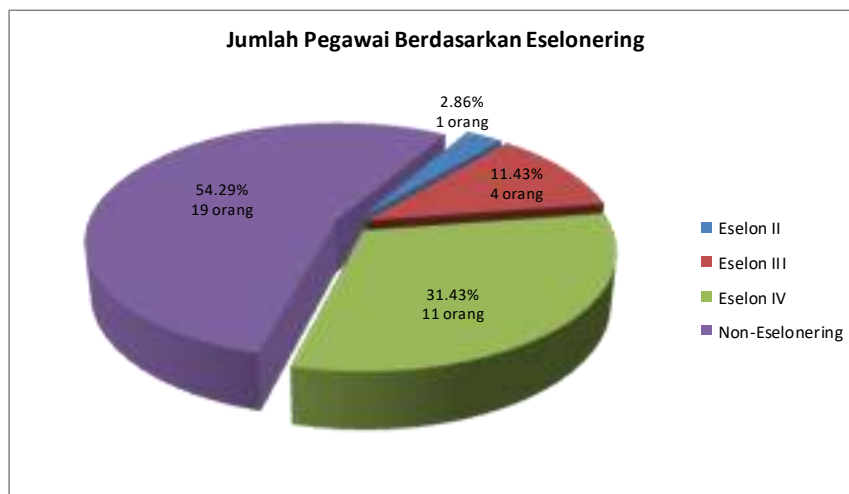


**Tabel 1.3.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering**

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	2.86%
2.	Eselon III	4	11.43%
3.	Eselon IV	11	31.43%
4.	Non-Eselonering	19	54.29%
Total		35	100%

Sumber : DUK Bappeda Litbang Tahun 2022

Diagram tabel 1.2.  
Jumlah Pegawai berdasarkan Eselonering



#### 1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain dukungan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran juga menjadi hal penting bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Bima. Untuk kondisi sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran Bappeda Litbang pada tahun 2022 sudah cukup memadai dengan adanya kantor baru yang berada dalam kompleks kantor Walikota Bima. Disamping itu juga fasilitas ruang rapat yang dimiliki Bappeda Litbang juga cukup memadai dalam menunjang intensitas kegiatan rapat koordinasi yang cukup tinggi dilaksanakan oleh bidang-bidang. Adapun gambaran kondisi sarana dan prasarana Bappeda Litbang Kota Bima sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.4**  
**Daftar Inventaris Bappeda Litbang Tahun 2022**

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan roda 4	2
2	Kendaraan roda 2	21
3	Mesin Presensi Sidik Jari	1
4	Kalkulator	1
5	Filing Besi	3
6	Filing Cabinet	2
7	Brankas	1
8	Lemari Kaca	1
9	Papan Informasi	1
10	Meja Kerja, Meja Rapat, Meja Printer, Meja Knap	65
11	Kursi Rapat, Kursi Kerja	55
12	Jam Dinding	1
13	Lemari es	4
14	AC	11
15	Sofa/kursi meja tamu	2
16	Laptop	25
17	Komputer PC	3
18	LCD Proyektor	1
19	Pesawat Telepon	1
20	Mesin Faxcimile	1
21	Sound System	1
22	Televisi	5
23	Scanner	1
24	Printer	10
25	Printer Scanner	1

Sumber: Data BMD Bappeda Litbang 2022.



## 1.5 Keuangan

Pada tahun 2022 Bappeda Litbang Kota Bima memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp6,582,427,890 pada APBD awal (murni). Kemudian pada perubahan APBD tahun 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp7,022,738,390 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp6.925.966.540,00, dengan rincian belanja pegawai (gaji dan TPP) sebesar RpRp3,812,695,810 belanja barang jasa sebesar Rp.6,829,194,690.00 dan belanja modal sebesar Rp96.771.850,00 Dukungan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Bima lebih khusus untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung yang meliputi 4 (empat) program, 14 kegiatan dan 47 sub kegiatan.

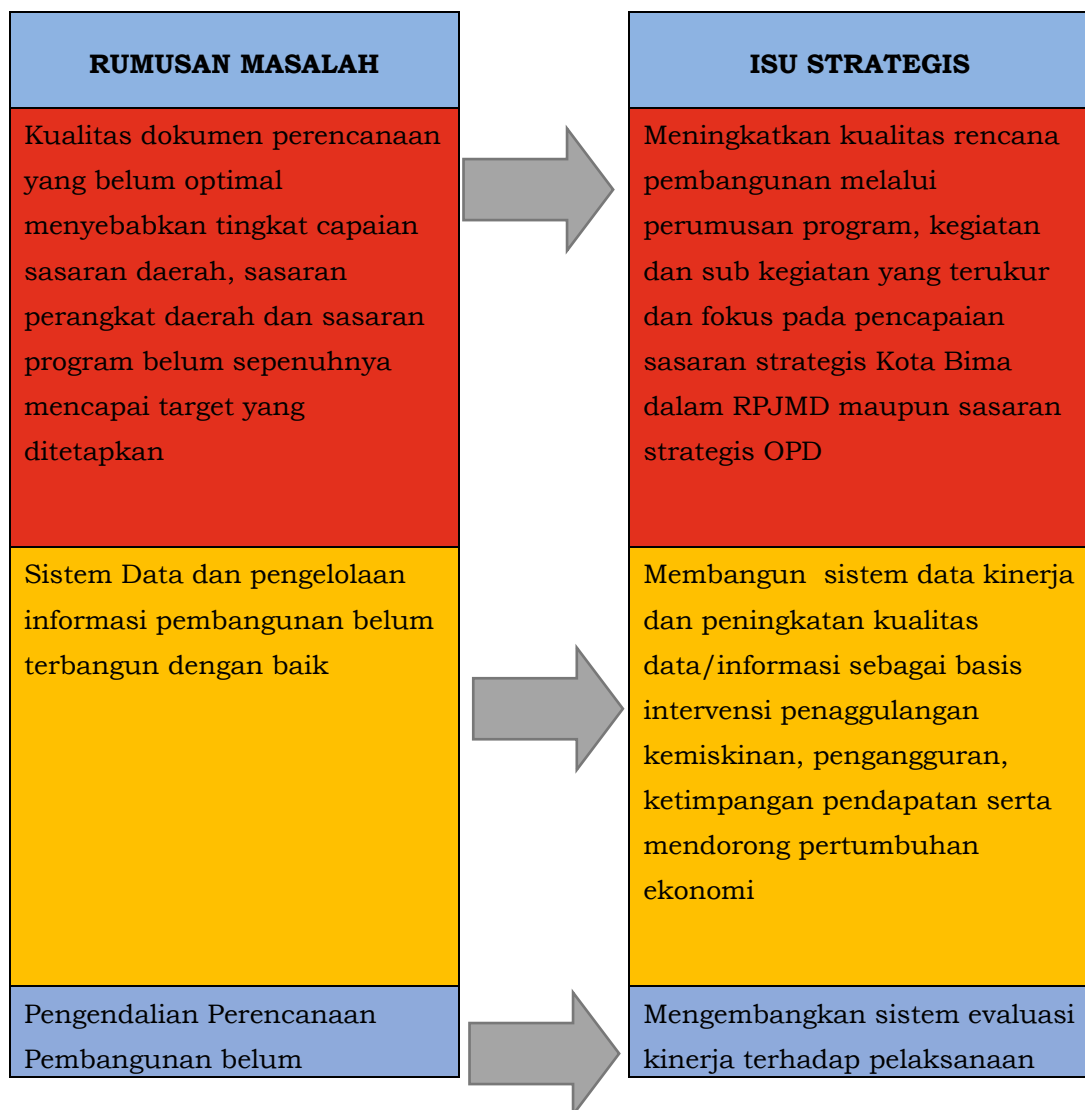
## 1.6 Isu Strategis yang dihadapi

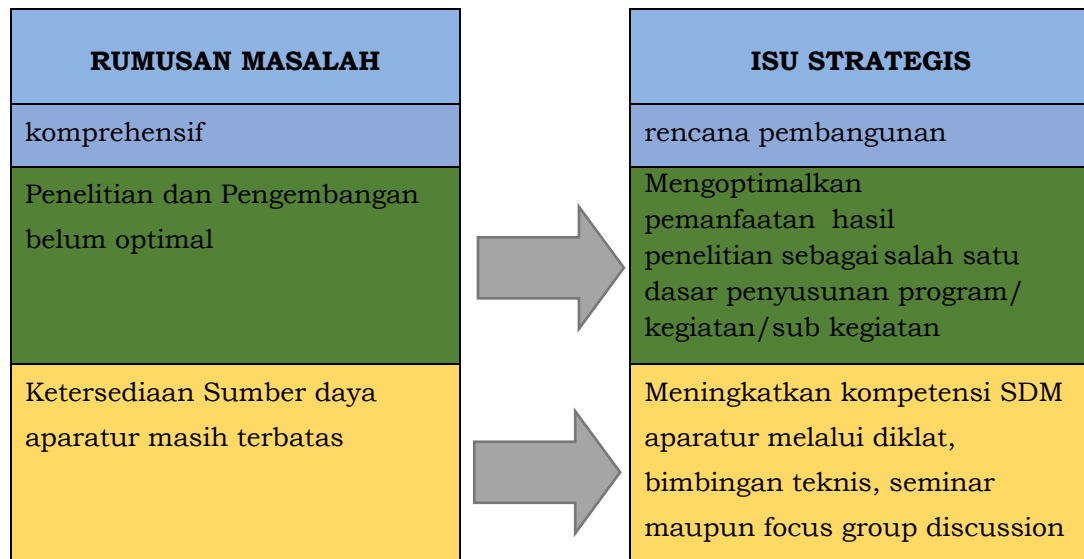
Bappeda Litbang sebagai OPD yang mempunyai fungsi perumusan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan dihadapkan beberapa permasalahan dan isu strategis. Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bappeda Litbang menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2022, isu strategis Bappeda Litbang dapat dirumuskan dalam gambar berikut ini :

Gambar 1.  
Permasalahan dan Isu Strategis dalam pelaksanaan tugas Bappeda Litbang pada tahun 2022





## 1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

### **Ringkasan Eksekutif**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Dalam ringkasan eksekutif ini juga dijelaskan langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, kondisi sumber daya manusia, kondisi saran dan prasarana, kondisi keuangan, isu strategis serta sistematika penulisan LKIP.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan metodologi pengukuran kinerja, uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## **LAMPIRAN**

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis

#### 2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kota Bima 2018-2023

Pada tahun 2021 Kota Bima melaksanakan perubahan RPJMD 2018-2023 tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui peraturan daerah Kota Bima nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Bima nomor 9 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bima Tahun 2018-2023. Perubahan ini dilakukan seiring dengan perubahan kebijakan nasional berupa RPJMN 2020-2024 dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan RPJMD ini juga mencakup penyesuaian berbagai indikator kinerja dan target-target tahunan sasaran strategis berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sampai dengan tahun 2020. Sedangkan rumusan visi dan misi dalam RPJMD 2018-2023 tidak mengalami perubahan.

Adapun uraian visi dan misi beserta tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

**VISI** : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri

**Tabel 2.1.**  
**Target Akhir RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
								2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76,2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,75	69,95	70,15	70,35
					Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas)	Persen (%)	99,29	99,29	99,79	100
						Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan	Persen (%)	27,17	35,83	40	44,17
					Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000 / bulan	1.400	1.500	1.600	1.700
					Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,7	88,1	90,5	92,8

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
								2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Angka	0,275	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Persen (%)	5	5,1	5,2	5,3
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	%	8,2	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penurunan Angka Kemiskinan	Persen (%)	Penurunan 3,33 %	3%	3,33 %	3,33 %
					Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)		6,52	6,67	7,14
Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka dan Huruf	82 (A)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	BB (70,01)	BB (72,00)	A (80,01)	A (80,01)
						Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,200)	Sangat Tinggi (3,2100)	Sangat Tinggi (3,2200)	Sangat Tinggi (3,2300)
						Opini BPK	Huruf	WTP	WTP	WTP	WTP
						Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	Persen (%)	5,72	6,1	6,3



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
								2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
					Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor IKM	Angka	85	86	87	88
Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	87	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen (%)	98,3	97	99	100
					Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	84	79	81	83
	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Persentase luas kawasan permukiman layak	%	100	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Penurunan kawasan kumuh	Persen (%)	13,11 %	34	51,52	100
					Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	Persen (%)	40	50,82	57,8	64,38

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
								2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
					Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	85	86	87	88
Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.	Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	Indeks Ketentraman	Angka	88	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	Persentase penurunan angka kriminalitas	Persen	30	35	40	45
						Persentase penurunan Angka Konflik Sosial	Persen	14,3	25	33	80
					Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persen (%)	3,2	4,2	5,3	6,3	
					Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	Angka	85	86	87	88

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Bima 2018-2023

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan Daerah, maka Bappeda Litbang memiliki rasa tanggung jawab dalam mewujudkan kelima misi pembangunan tersebut. Bersamaan dengan itu pula, Bappeda Litbang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian misi pembangunan nomor 3 yaitu Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan tolok ukur indeks reformasi birokrasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan nilai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran ini adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani melalui internalisasi delapan agenda reformasi birokrasi. Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya kemandirian keuangan daerah yang ditandai oleh kontribusi PAD terhadap pendapatan. Strategi yang dilaksanakan untuk sasaran ini adalah meningkatkan tata kelola pendapatan daerah. Sedangkan sasaran ketiga dari misi ketiga ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan tolok ukur skor indeks kepuasan masyarakat dengan strategi pelaksanaan yang di tempuh adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sektor, serta penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan salah satu faktor kunci tercapainya misi tersebut.

Disamping misi ketiga tersebut, Bappeda Litbang berperan untuk pencapaian setiap misi pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan. Misi pertama, yaitu Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia yang dijabarkan kedalam tiga sasaran yaitu: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatnya daya beli masyarakat

dan meningkatnya ketahanan pangan. Indikator pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. Beberapa strategi yang akan diterapkan dalam rangka mencapai target indikator sasaran ini adalah Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima baik dalam preventif maupun kuratif. Strategi ini akan meliputi uapay-upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan upaya pelayanan kesehatan, regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan, peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga. Sedangkan indikator pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan diukur dengan Angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar dan persentase peningkatan mutu pendidikan. Strategi yang diterapkan untuk mencapainya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan PAUD dan Pendidikan dasar yang berkualitas, maupun non-formal serta informal. Peningkatan pengembangan pendidikan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, serta optimalisasi pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan. Sedangkan sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dengan tolak ukur pengeluaran perkapita. Untuk mencapai hal tersebut maka secara garis besar strategi pencapaiannya adalah stabilisasi perekonomian, pembangunan kawasan dan penguatan sector strategis. Disamping itu, potensi-potensi kelembagaan ekonomi mikro-kecil dan koperasi untuk diberdayakan dan dioptimalisasi produktivitasnya. Sasaran terakhir atau keempat dari misi 1 adalah meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator indeks ketahanan pangan akan ditempuh melalui strategi Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan, peningkatan pembinaan budidaya dan produk kehewan dan perikanan, serta peningkatan pembinaan budidaya dan produk hasil pertanian. Peran Bappeda Litbang dalam hal ini adalah mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan perekonomian.

Misi kedua Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis

Pengembangan Produk Unggulan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat dengan indikator indeks gini dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan indikator angka kemiskinan. Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan adalah yang pertama adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan PDRB. Sasaran ini dimaknai dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan per kapita. Naiknya PDRB, dengan dibarengi turunnya tingkat ketimpangan, merupakan indikator menguatnya ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatnya daya saing kota Bima. Oleh karena itu strategi pencapaiannya adalah Mengembangkan sector pariwisata sebagai poros integrasi pembangunan produk unggulan dalam kerangka pembangunan ekonomi Kota Bima yang berkelanjutan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus didukung pengembangannya dengan berbagai pengelolaan, promosi dan pembinaan. Disamping itu, simpul-simpul bisnis seperti industri dan perdagangan termasuk didalamnya adalah pasar, sangat penting untuk dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Sektor pertanian dan perikanan juga tetap dipertahankan produktifitasnya yang mengarah pada pengembangan bibit unggul dan pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah. Aspek yang tidak kalah penting dalam pengembangan ekonomi adalah membangun iklim investasi yang kondusif dan kemudahan pelayanan perijinan. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan pelayanan dan regulasi terkait perijinan usaha dan penanaman modal menjadi satu strategi penting yang akan dikelola dalam lima tahun kedepan. Peran Bappeda Litbang dalam ikut mewujudkan sasaran pertama dari misi kedua tersebut adalah fungsi koordinatifnya sebagai instansi perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, ekonomi kerakyatan atau usaha mikro-kecil, koperasi, pariwisata, ekonomi kreatif, pasar dan investasi adalah ragam isu yang ditangani di bawah koordinasi bidang ekonomi. Dengan demikian, amanah yang diembanya adalah untuk memastikan bahwa misi penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing kota tercapai melalui koordinasi-koordinasi dengan OPD yang bertanggung-jawab dalam berbagai aspek ekonomi, serta berbagai pemangku kepentingan lain yang terkait.

Sedangkan sasaran kedua dari misi kedua adalah menurunnya angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan, ditempuh dengan strategi meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan memperluas cakupan penanganan PMKS. peningkatan akses ini akan mencakup perlindungan dan jaminan sosial, peningkatan advokasi dan rehabilitasi sosial, dan peningkatan data, informasi dan pemberdayaan social, peningkatan pemberdayaan masyarakat secara umum, peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, peningkatan perlindungan anak, serta peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan pada 5 kecamatan. Karena persoalan kemiskinan memiliki sifat lintas sektor yang akan sukar penyelesaiannya jika hanya melibatkan satu atau dua OPD untuk mengintervensinya. Oleh karenanya, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas sektor memiliki sekretariat di Bappeda Litbang sebagai pusat koordinasi. Dalam hal ini, tentu saja Bappeda Litbang diharapkan untuk secara pro-aktif melibatkan dan mendorong peran serta berbagai pemangku sector dan pemangku kepentingan untuk ikut bersama-sama menurunkan angka kemiskinan di Kota Bima, sesuai dengan tugas dan kompetensi masing-masing.

Sedangkan sasaran ketiga dari misi kedua adalah meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka yang dilaksanakan melalui strategi meningkatkan partisipasi angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembanguna BLK sebagai wadah penyediaan tenaga kerja trampil serta peningkatan akses permodalan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), perluasan jaringan pemasaran ketenagakerjaan dan membangun hubungan industrial ketenagakerjaan. Disamping itu juga keselamatan dan perlindungan tenaga kerja menjadi aspek yang penting dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Misi Ketiga adalah Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; dibagian awal sudah diuraikan terkait tujuan dan sasaran dari Misi ketiga ini. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, misi ini berkaitan erat dengan banyak OPD dalam pelaksanaannya, oleh karena itu beberapa hal yang berkaitan dengan area reformasi birokrasi yang akan dilakukan adalah dengan peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, penataan peraturan

perundang-undangan dan pelayanan hukum, peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan pengadaan barang/ jasa, peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketata-laksanaan pemerintah daerah, peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan secretariat daerah, peningkatan pelayanan kedinasaan pucuk pimpinan daerah, peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan di berbagai bidang, peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah, peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran, pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer, peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan, peningkatan perencanaan, pemanfaatan, dan inventarisasi asset, peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah, pengoptimalan pembukuan dan penagihan pajak daerah, peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintah dan aparatur, peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan di berbagai bidang, peningkatan dan evaluasi pengawasan, peningkatan pengembangan karir aparatur sipil Negara, peningkatan kompetensi aparatur sipil Negara, peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, peningkatan pengelolaan pengembangan kearsipan, penyelamatan data dan informasi arsip, pengoptimalan penyusunan fasilitasi penyusunan perundang-undangan, peningkatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, peningkatan pengelolaan informasi dan statistic, peningkatan komunikasi public, pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, dan peningkatan pelayanan persandian. Tugas Bappeda Litbang , selain secara langsung ikut berkontribusi dalam meningkatkan tata Kelola pemerintah dalam bidang perencanaan, adalah dengan turut mengkoordinasikan OPD terkait yang ikut berperan dalam mewujudkan misi untuk memastikan tercapainya misi tersebut.

Misi keempat, Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana; dicapai dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dengan indkator Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup. Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana dengan indikator persentase luas kawasan permukiman layak. Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang dengan indikator persentase kesesuaian tata ruang, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator persentase kawasan kumuh, meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dengan indikator persentase infrastruktur dalam kondisi baik dan meningkatnya ketahanan terhadap bencana dengan indikator indeks ketahanan daerah. Sasaran pertama dapat dicapai dengan beberapa strategi meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Bima. Ini dimaksudkan untuk peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang, peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang, dan optimalisasi pengelolaan pertanahan. Sementara itu, keberhasilan untuk sasaran kedua dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup dilaksanakan dengan strategi membangun system pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat secara terpadu, peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup, optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik. Selanjutnya strategi yang ditempuh dalam upaya mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman adalah peningkatan ketersediaan PSU dan pembangunan rumah layak huni. Adapun strategi dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur daerah yang mendukung produktifitas sector unggulan daerah dan investasi yang meliputi jalan, jembatan, PJU, pengairan, drainase, sarana pengolahan limbah, sarana dan prasarana air bersih dan bangunan sesuai standar, lalu lintas dan perparkiran, peningkatan angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas. Sasaran kelima dari misi ke empat RPJMD Kota Bima adalah meningkatnya ketahanan terhadap bencana yang akan ditempuh dengan strategi meningkatkan cakupan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, serta peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Bappeda, terutama



dibawah koordinasi bidang Ekonomi dan Infrastruktur memiliki peran untuk memastikan bahwa misi ini tertuang dan dilaksanakan dalam program/kegiatan dari OPD yang terkait.

Misi kelima Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais. Tujuan misi ini adalah meningkatkan masyarakat yang tenteram, bermoral dan agamais dengan indikator indeks ketentraman dengan didukung oleh tiga sasaran strategis. Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dengan indikator angka kriminalitas dan angka konflik sosial. Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal dengan indikator presentase nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina. Sedangkan sasaran strategis yang ketiga adalah meningkatnya pengamalan ajaran agama dengan indikator indeks kerukunan umat beragama. Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran pertama adalah meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menekan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta konflik social guna mewujudkan stabilitas daerah. Kemudian strategi untuk mencapai sasaran kedua adalah dengan memperluas cakupan perlindungan dan pengembangan budaya daerah. Sedangkan strategi untuk mencapai sasaran ketiga adalah dengan meningkatkan kerukunan umat beragama dan mendorong syiar keagamaan di kalangan masyarakat.

### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bima, Bappeda Litbang perlu menetapkan tujuan dan sasarannya. Tujuan dan sasaran Bappeda Litbang merupakan turunan dari Misi Ketiga Pemerintah Kota Bima yaitu Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Disamping itu, penetapan tujuan dan sasaran ini juga perlu dilakukan agar program dan kegiatan serta sumber daya yang dimiliki dapat terarah dan fokus pada hasil yang diinginkan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan hasil merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,

mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Bima digambarkan pada tabel 2.2. berikut.

**Tabel 2.2.**  
**Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persen	-	-	77,97	78,97	80,00

Sumber: Hasil Analisa

Tujuan jangka menengah Bappeda Litbang adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja indeks kualitas perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, selaras dan konsisten secara substantif antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas juga dimaknai sebagai perumusan program pembangunan harus benar-benar terukur dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian visi misi daerah maupun tujuan dan sasaran seluruh perangkat daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah juga dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Secara lebih spesifik, indikator tersebut diformulasikan sebagai berikut: *50% Capaian sasaran pemkot + 30% Sasaran perangkat daerah + 20% Capaian program perangkat daerah dikalikan 100*. Formulasi perhitungan target indikator kinerja ini didukung oleh penyajian data rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bima setiap tahunnya, kemudian rata-rata capaian indikator kinerja utama Organisasi Perangkat Daerah dan rata-

rata capaian indikator program seluruh perangkat daerah. Kondisi awal dari indeks perencanaan pembangunan pada tahun 2018-2020 belum ada karena belum diukur menggunakan indikator tersebut. Dalam konteks Perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai ditahun 2022 adalah sebesar 80 poin. Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan indeks sebesar 1,0 poin pada tahun 2022 dari tahun 2021, kemudian kenaikan target sebesar 1,03 poin pada tahun 2023. Adapun argumen yang menjadi latar belakang penentuan kenaikan tiap tahun sebesar 1,0 poin tahun 2022 dan 1,03 poin tahun 2023 yaitu ketepatan waktu penyajian data-data indikator makro yang tertuang dalam IKU Kota dari pihak eksternal seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian trend peningkatan kemampuan keuangan daerah yang relatif stagnan sehingga menghambat upaya-upaya untuk memacu peningkatan capaian kinerja secara signifikan baik pada tingkat program maupun pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dan sasaran strategis Kota Bima.

### **2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Strategi merupakan langkah taktis yang mencakup program sebagai prioritas pembangunan daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Bappeda Litbang yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut Hal itu berimplikasi pada dilakukannya perubahan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Bima juga pada tahun 2021.



Tabel 2.3

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis  
Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022**

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		Rp7,022,738,390	Rp6,695,345,281	<b>95.34%</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp5,081,253,390</b>	<b>Rp4,972,689,604</b>	<b>97.86%</b>
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp90,003,000	Rp89,003,000	<b>98.89%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp4,730,000	Rp4,730,000	100.00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp4,035,100	Rp4,035,100	100.00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp5,550,000	Rp5,550,000	100.00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp3,520,000	Rp3,520,000	100.00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp8,150,000	Rp8,150,000	100.00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp3,820,000	Rp3,820,000	100.00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp60,197,900	Rp59,197,900	98.34%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3,961,135,810	Rp3,869,284,009	<b>97.68%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3,812,695,810	Rp3,720,844,009	97.59%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp132,670,000	Rp132,670,000	100.00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp8,790,000	Rp8,790,000	100.00%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp2,250,000	Rp2,250,000	100.00%
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp4,730,000	Rp4,730,000	100.00%
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp754,144,630	Rp752,674,220	<b>99.81%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp9,318,700	Rp9,315,000	99.96%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp71,771,850	Rp70,584,900	98.35%

No		Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp146,849,000	Rp146,782,000	99.95%
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp102,237,900	Rp102,232,000	99.99%
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp423,967,180	Rp423,760,320	99.95%
	D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp128,297,450	Rp121,887,700	<b>95.00%</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp41,300,000	Rp39,250,000	95.04%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp43,442,450	Rp39,082,700	89.96%
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp12,200,000	Rp12,200,000	100.00%
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp31,355,000	Rp31,355,000	100.00%
	E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp147,672,500	Rp139,840,675	<b>94.70%</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp127,962,500	Rp123,980,675	96.89%
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp15,860,000	Rp15,860,000	100.00%
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp3,850,000	Rp0	0.00%
	2	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Rp255,445,000</b>	<b>Rp246,777,401</b>	<b>96.61%</b>
	E	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp120,692,000	Rp120,636,000	<b>99.95%</b>
	1	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp31,847,000	Rp31,847,000	100.00%
	2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp38,440,000	Rp38,384,000	99.85%
	3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp50,405,000	Rp50,405,000	100.00%
	F	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp134,753,000	Rp126,141,401	<b>93.61%</b>
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp27,788,000	Rp27,447,200	98.77%
	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Rp25,905,000	Rp25,755,360	99.42%
	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp81,060,000	Rp72,938,841	89.98%

No		Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
<b>3</b>		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Rp1,245,729,500</b>	<b>Rp1,197,416,179</b>	<b>96.12%</b>
G		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp371,380,000	Rp344,990,531	<b>92.89%</b>
	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp107,672,000	Rp101,211,473	94.00%
	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp22,810,000	Rp22,575,000	98.97%
	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp218,088,000	Rp199,864,058	91.64%
	4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp22,810,000	Rp21,340,000	93.56%
H		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp369,882,800	Rp356,411,272	<b>96.36%</b>
	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp175,916,900	Rp175,869,677	99.97%
	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp21,172,800	Rp21,022,800	99.29%
	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp160,855,100	Rp147,685,795	91.81%
	4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp11,938,000	Rp11,833,000	99.12%
I		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp504,466,700	Rp496,014,376	<b>98.32%</b>
	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp308,473,500	Rp302,131,900	97.94%
	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp21,395,400	Rp20,045,400	93.69%
	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp153,410,000	Rp152,706,276	99.54%
	4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp21,187,800	Rp21,130,800	99.73%



No		Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
4		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Rp440,310,500</b>	<b>Rp278,462,097</b>	<b>63.24%</b>
J		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp112,500,000	Rp1,820,000	<b>1.62%</b>
1		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp112,500,000	Rp1,820,000	1.62%
K		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp16,046,000	Rp12,810,000	<b>79.83%</b>
1		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Rp16,046,000	Rp12,810,000	79.83%
L		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp16,046,000	Rp15,731,000	<b>98.04%</b>
1		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp16,046,000	Rp15,731,000	98.04%
M		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp295,718,500	Rp248,101,097	<b>83.90%</b>
1		Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp224,947,000	Rp196,437,517	87.33%
2		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Rp70,771,500	Rp51,663,580	73.00%

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022

## 2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Bappeda Litbang Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.



**Tabel 2.4.**  
**Indikator Kinerja Utama BAPPEDA LITBANG Kota Bima**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	$(0,5(\text{capaian sasaran pemkot})+0,3(\text{sasaran perangkat daerah})+0,2 (\text{sasaran pembangunan daerah})\times 100)$

Sumber: Renstra Litbang Tahun 2018-2023

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, selaras dan konsisten secara substantif antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas juga dimaknai sebagai perumusan program pembangunan harus benar-benar terukur dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian visi misi daerah maupun tujuan dan sasaran seluruh perangkat daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah juga dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Secara lebih spesifik, indikator tersebut diformulasikan sebagai berikut: *50% Capaian sasaran pemkot + 30% Sasaran perangkat daerah + 20% Capaian program perangkat daerah dikalikan 100*. Formulasi perhitungan target indikator kinerja ini didukung oleh penyajian data rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bima setiap tahunnya, kemudian rata-rata capaian indikator kinerja utama Organisasi Perangkat Daerah dan rata-rata capaian indikator program seluruh perangkat daerah.

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada RPJMD, IKU, dan anggaran atau DPA.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.5.**  
**Penetapan Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	78,97%%

**Tabel 2.6.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2022**

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>100%</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>BB</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD Perubahan	2 dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	2 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	2 dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	2 Laporan
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	17 Laporan
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi anggaran	1 dokumen
<b>C</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan
<b>D</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan
<b>E</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda 2
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	5 unit laptop dan 2 Pc
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit
<b>II</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	<b>78,97%</b>
<b>F</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	<b>78,97%</b>
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8 OPD
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	8 OPD
3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 OPD
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan	8 OPD

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Pembangunan Manusia	Manusia	
<b>G</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>78,97%</b>
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 OPD
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 OPD
3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 OPD
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 OPD
<b>H</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan</b>	<b>78,97%</b>
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 OPD
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 OPD
3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 OPD
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 OPD
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>78,97%</b>

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	<b>PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
<b>I</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>78,97%</b>
1	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita Acara forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah	1 berita acara
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita acara musrenbang kabupaten/kota	1 berita acara
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen
<b>J</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya</b>	<b>78,97%</b>
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2 laporan
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	1 laporan
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4 laporan
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>100%</b>
<b>K</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya</b>	<b>100%</b>
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Dokumen
<b>L</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya</b>	<b>100%</b>
1	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen
2	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen penelitian dan pengendalian bidang partisipasi masyarakat yang dihasilkan	1 Dokumen
<b>M</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		<b>dalam perencanaan selanjutnya</b>	
2	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen
<b>N</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase peningkatan inovasi daerah</b>	<b>100%</b>
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan perencanaan dibidang teknologi dan inovasi	1 dokumen
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	3 laporan

Sumber: Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Bima telah melakukan penilaian kinerja atas kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Bappeda Litbang Kota Bima dengan Walikota Bima tahun 2022. Penilaian ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data kinerja yang pada akhirnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran dan penilaian kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator. Adapun kerangka yang digunakan dalam menghitung kinerja yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:  $\% \text{ capaian kinerja} = (\text{realisasi kinerja} / \text{target kinerja}) \times 100\%$ . Indikator Kinerja sasaran dengan pencapaian kinerja yang menggunakan perhitungan diatas adalah sebagai berikut: Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan skala pengukuran dan predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

#### 3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan

Pengukuran capaian target kinerja tujuan dilakukan sama dengan proses dan penilaian yang dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran karena rumusan tujuan dan indikator tujuan sekaligus menjadi sasaran strategis Bappeda Litbang. Adapun realisasi kinerja tujuan Bappeda Litbang pada tahun 2022 mencapai 98,36% dari target 78,97% atau dengan tingkat capaian 124,55% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	persentase	78,97	98,36	124,55

Sumber: Hasil Analisa

#### 3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sebagaimana dijelaskan pada sub bagian sebelumnya bahwa tujuan Perangkat Daerah Bappeda Litbang langsung menjadi sasaran strategis Bappeda Litbang. Oleh karena itu, uraian capaian kinerja sasaran strategis tahun 2022 ini akan lebih difokuskan pada penyajian capaian pada setiap

komponen pengukuran capaian indikator yaitu capaian sasaran strategis daerah (RPJMD), capaian sasaran strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan capaian program pembangunan daerah. Dengan demikian formula yang digunakan untuk pengukuran yaitu:  $(50\% \times \text{capaian sasaran daerah}) + (30\% \times \text{sasaran perangkat daerah}) + (20\% \times \text{capaian program pembangunan daerah})$ . Capaian tersebut secara teknis pelaksanaan dan pengendaliannya terdistribusi ke dalam 3 bidang yaitu bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta bidang Penelitian dan Pengembangan.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022**

Sasaran	Indikator	Metodologi (Formula indikator)	2021		2022		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks dihitung dengan formula $50\% \text{ capaian sasaran daerah} + 30\% \text{ capaian sasaran PD} + 20\% \text{ capaian program daerah}$	77,97%	86,26%	78,97%	98,36%	124,55%
		Data					
		Capaian sasaran daerah		80,31		101,97	
		Capaian sasaran perangkat daerah		91,80		96,88	
		Capaian program daerah		92,81		91,53	

Sumber: Hasil Analisa

Hasil perhitungan rata-rata capaian sasaran Bappeda Litbang Kota Bima sebesar 98.36 %, diperoleh dari penjumlahan :

Capaian sasaran secara teknis kendalanya terdistribusi di dalam 3 bidang yaitu di bawah bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta bidang Penelitian dan Pengembangan. Hasil perhitungan rata-rata capaian sasaran Bappeda Litbang Kota Bima sebesar 98.36 %, diperoleh dari penjumlahan :

1. Capaian sasaran Pemerintah Kota Bima yang terdiri dari 16 sasaran didapat nilai rata-rata 101,97% ( $50\% \times 101,97\% = 50,99\%$ )
2. Capaian sasaran Perangkat Daerah yang terdiri dari 75 sasaran didapat nilai rata-rata 96,88% ( $30\% \times 96,88\% = 29,10\%$ )
3. Capaian Program Pembangunan Daerah yang terdiri dari 114 capaian program didapat nilai rata-rata 91,53% ( $20\% \times 91,53\% = 18,31\%$ )

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Bappeda Litbang Kota Bima pada tahun 2022 sudah sesuai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 78,97% . Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi.

Adapun penyajian data rekapitulasi capaian indikator kinerja sasaran daerah, capaian sasaran perangkat daerah dan capaian program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 – 3.7

**Tabel 3.4**  
**Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SEKTOR PEREKONOMIAN</b>								
1	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Rp./ org/ Tahun)	11.125.000,00	11.135.000,00	100,09	11.225.000,00	11.395.000,00	101,51
2	Meningkatnya pertahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	63,58	65,9	103,65	63,6	69,28	108,93

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	3,3	-4,95	-150	3,6	2,08	57,78
4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	5,02	5,86	116,73	5,12	6,48	126,56
<b>Rata-Rata</b>					<b>42,62</b>			<b>98,70</b>
<b>SEKTOR PEMBANGUNAN MANUSIA</b>								
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,55	70,5	101,37	70,15	70,83	100,97
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Wajib Belajar pendidikan Dasar	99,79	99,17	99,38	100	98	98
		Persentase peningkatan mutu pendidikan	29,17	33	113,13	31,17	33	105,87
3	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	8,74	8,88	98,42	8,67	8,8	98,52
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85	3,56	108,15	3,76	3,73	100,8
5	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama Kota Bima	84	67,46	86,18	84	72,39	86,18
<b>Rata-Rata</b>					<b>121,33</b>			<b>118,07</b>
<b>SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>								
1	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	98,1	98,5	100,41	98.20%	98.80%	100,61
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	41	9,94	24,24	42	49	116,67
4	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	83,7	74	88,41	83,91	74	88,19
5	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	30,5	5,8	19,02	31	52	167,74

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Rata-Rata</b>					<b>58,02</b>			<b>118,30</b>
<b>SEKTOR PEMERINTAHAN</b>								
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B (68,00)	B(68,48)	100,71	B (69,00)	B (68,69)	99,55
		Skor LPPD	Sangat Tinggi 3,2100	Sangat Baik (3,2595)	101,54	Sangat Tinggi (3,2200)	Sangat Baik 3,2595	101,23
		Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
<b>Rata-Rata</b>					<b>100,75</b>			<b>100,26</b>
<b>SEKTOR SUMBERDAYA ALAM</b>								
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	61	52,73	86,44	62	56.08	90,45
<b>Rata-Rata</b>					<b>86,44</b>			<b>90,45</b>
<b>Rata-Rata Keseluruhan</b>					<b>80,31</b>			<b>101,97</b>

Sumberdata:Data Kinerja Tribulan IV Tahun2022

**Tabel 3.5**  
**Program Prioritas Pendukung Capaian per Sektor**

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>SEKTOR PEREKONOMIAN</b>									
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terlatih	persen	-	-		25,00	20,00	80,00	Tenaga Kerja
	Angka produktivitas tenaga kerja	persen	-	-	-	38,00	43,72	115,05	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diinput ke dalam Sistem Data Online (ODS)	persen	23,87	25,00	104,73	63,26	84,22	133,13	Koperasi dan UKM
	Persentase Usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	persen	24,00	10,00	41,67	12,06	15,90	131,84	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	persen	20,00	21,00	105,00	23,10	29,00	125,54	Koperasi dan UKM

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi	persen	6,41	7,40	115,44	34,10	43,40	127,27	
	Persentase Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	persen	10,60	12,50	117,92	10,60	4,30	40,57	
	Persentase Usaha Mikro yang bermitra	persen	25,11	31,00	123,46	30,20	33,00	109,27	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perdagangan
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	persen	30,00	28,00	93,33	32,00	19,58	61,19	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	persen	46,72	53,96	115,50	47,02	37,32	79,37	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	persen	15,50	12,70	81,94	17,40	13,70	78,74	Perikanan dan Kelautan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	12,70	15,50	122,05	13,60	14,60	107,35	Perikanan dan Kelautan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai investasi	persen	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	Penanaman Modal
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	12,70	15,50	122,05	13,60	14,60	107,35	Perikanan dan Kelautan



No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Persentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	persen	10,00	6,67	66,70	12,00	6,60	55,00	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan ODTW	persen	32,00	32,00	100,00	32,00	32,00	100,00	Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	persen	30,00	32,00	106,67	32,00	40,00	125,00	Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisataan yang terlibat	persen	33,00	25,00	75,76	33,00	28,00	84,85	Pariwisata
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan peningkatan SDM pertanian	persen	12,00	13,27	110,58	12,00	13,72	114,33	Pertanian
<b>Rata-Rata</b>					<b>93,90</b>			<b>97,66</b>	
<b>SEKTOR PEMBANGUNAN MANUSIA</b>									
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pengelolaan Pendidikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Pengembangan Kurikulum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pendidikan

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang representatif	Persen	100,00	100,00	100,00	80,00	85,00	106,25	Perpustakaan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah saryankes yang berakreditasi minimal madya	Angka	3/7 Saryankes	3/7 Saryankes	100,00	4 /7 Saryankes	4 /7 Saryankes	100,00	Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar	Persen	90,00	85,00	94,44	95,00	90,00	94,74	Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang di bina	Persen	90,00	85,00	94,44	96,00	100,00	104,17	Kesehatan
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PENURUNAN (UNMET NEED)	Persen	8,72	8,72	100,00	8,60	8,60	100,00	Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	Persen	42,86	42,86	100,00	47,62	47,00	98,70	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Angka Ketersediaan Energi	Kka/ kap/ hari	263,00	268,00	101,90	266,00	320,00	120,30	Pangan

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi	Gram/ kap/ hari	66,68	74,17	111,23	67,17	75,14	111,87	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	persen	25,00	33,00	132,00	40,00	42,00	105,00	Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan ternak yang terinveksi PHMS (%)	persen	12,00	10,00	83,33	12,00	14,00	116,67	Pertanian
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan	persen	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	persen	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	persen	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	persen	73,00	73,00	100,00	73,00	75,00	102,74	Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian perencanaan tenaga kerja dengan realisasi	persen	-	-		95,00	94,00	98,95	Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terlatih	persen	-	-		25,00	20,00	80,00	Tenaga Kerja
	Angka produktivitas tenaga kerja	persen	-	-		38,00	44,00	115,79	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	persen	-	-		98,00	92,00	93,88	Tenaga Kerja
	Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	persen	-	-		100,00	100,00	100,00	Tenaga Kerja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100,00	98,98	98,98	100,00	92,50	92,50	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	persen	75,00	70,00	93,33	85,00	75,00	88,24	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kebudayaan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	persen	100,00	97,24	97,24	100,00	95,66	95,66	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Rata-Rata</b>					<b>90,28</b>			<b>99,12</b>	

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
<b>SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya	persen	33,10	21,61	65,29	34,70	22,40	64,55	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatkan kualitas permukiman masyarakat	persen	20,90	19,00	90,91	25,00	N/A		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah tangga pengguna air bersih/air minum layak	persen	45,00	38,60	85,78	47,80	47,20	98,74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	42,00	22,50	53,57	44,10	35,10	79,59	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	persen	35,10	34,90	99,43	38,90	32,97	84,76	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	persen	20,69	20,84	100,72	45,00	43,76	97,24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani	persen	67,00	66,49	99,24	70,00	71,54	102,20	Lingkungan Hidup

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Jalan Kota dalam kondisi mantap	persen	21,00	23,00	109,52	23,20	23,00	99,14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Peninngkatan luas area pertanian yang dilayani irigasi teknis	persen	20,00	14,20	71,00	22,00	22,73	103,32	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA J)	Persentase sarana dan prasarana yang telah sesuai standar	persen	-	-		90,00	90,00	100,00	Perhubungan
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pemenuhan sistem kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana	persen	63,61	50,80	79,86	70,38	60,66	86,19	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, BPBD
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan berkurangnya dampak bencana pertanian	persen	50,00	75,00	150,00	50,00	75,00	150,00	Pertanian
<b>Rata-rata</b>					<b>91,39</b>			<b>96,89</b>	
<b>SEKTOR PEMERINTAHAN</b>									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	persen	98,33	98,10	99,77	100,00	100,00	100,00	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Setda)

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Setda)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	persen	77,97	100,00	128,25	78,97	100,00	126,63	Perencanaan
	Persentase hasil evaluasi dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	persen	77,97	100,00	128,25	78,97	100,00	126,63	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	persen	77,97	100,00	128,25	78,97	100,00	126,63	Perencanaan
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persen	77,97	100,00	128,25	78,97	100,00	126,63	
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	persen	77,97	100,00	128,25	78,97	100,00	126,63	



No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tingkat kepatuhan rasio penganggaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penurunan Risiko Pengawasan	persen	21,02	23,80	113,23	23,80	30,95	130,04	Pengawasan
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase peningkatan Nilai SAKIP dan LPPD Perangkat Daerah	persen	38,10	42,86	112,49	42,86	57,14	133,32	Pengawasan
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Porsentase PD yang menerapkan e-government dan pelayanan TIK	persen	75,00	75,00	100,00	85,00	85,00	100,00	Komunikasi dan Infomatika
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD dan Jumlah Dokumen Laporan Pendapatan Daerah yang disusun	persen	56,00	56,00	100,00	60,00	60,00	100,00	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Keuangan)

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah Persentase Pendaftaran Penduduk	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-17 Tahun	persen	93,00	95,80	103,01	95,00	99,30	104,53	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA J)	Persentase sarana dan prasarana yang telah sesuai standar	persen	-	-		90,00	90,00	100,00	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Predikat PLID Kota Bima	persen	B(80%)	B(80%)	100,00	A(100%)	A(100%)	100,00	Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Penanaman Modal
<b>Rata-rata</b>					<b>109,99</b>			<b>111,17</b>	
<b>SEKTOR SUMBERDAYA ALAM</b>									

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Menurunnya Pelanggaran Terhadap RPPLH	persen	60,00	60,00	100,00	60,00	50,00	83,33	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA	Indeks Kualitas air	indeks	50,00	24,55	49,10	50,00	28,75	57,50	Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas udara		80,00	85,35	106,69	82,00	87,33	106,50	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	persen	11,01	11,21	101,82	11,34	11,30	99,65	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KOTA	Persentase Meningkatnya Jumlah Ormas Sadar Lingkungan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani	persen	67,00	66,49	99,24	70,00	71,54	102,20	Lingkungan Hidup
<b>Rata-Rata</b>					<b>92,81</b>			<b>91,53</b>	

Sumber: Hasil Analisa

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021-2022**

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	
<b>A</b>	<b>SEKTOR PEREKONOMIAN</b>			<b>Rata-Rata</b>			<b>72,42</b>	<b>Rata-Rata</b>		<b>91,55</b>
<b>1</b>	<b>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</b>									
1	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Kelembagaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Persen	3,50	-17,00	-485,71	8,15	9,59	117,67	
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persen	8,00	6,16	77,00	2,39	3,12	130,54	
2	Meningkatnya Investasi Usaha Industri	Persentase Peningkatan Investasi Usaha Industri	Persen	20,46	19,27	94,18	1,16	0,12	10,34	
3	Meningkatnya Investasi Usaha Perdagangan	Persentase Peningkatan Investasi Usaha Perdagangan	Persen	42,10	30,00	71,26	42,10	30,00	71,26	
<b>Rata-Rata</b>						<b>-60,82</b>			<b>82,45</b>	
<b>2</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	86,00	86,69	100,80	88,86	87,12	98,00	

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
	Investasi	Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	Persen	10,00	32,00	320,00	10,00	N/A	
<b>Rata-Rata</b>						<b>100,80</b>			<b>49,00</b>
<b>3</b>	<b>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</b>								
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Durasi lama tinggal	Hari	2,00	1,50	75,00	2,00	1,30	65,00
		Persentase peningkatan wisatawan yang berkunjung ke ODTW	Persen	30,00	32,00	106,67	32,00	40,00	125,00
2	Meningkatnya pemuda berprestasi	Persentase pemuda berprestasi	Orang	11,00	8,00	72,73	11,00	10,00	90,91
<b>Rata-Rata</b>						<b>84,80</b>			<b>93,64</b>
<b>4</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>								
1	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan	Persentase penyediaan Pangan Utama	Persen	20,00	24,00	120,00	24,00	32,00	133,33
		Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	Persen	≤ 10	≤ 10	100,00	≤ 10	≤ 10	100,00
2	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Persen	87,00	86,00	98,85	88,30	81,80	92,64
<b>Rata-Rata</b>						<b>106,28</b>			<b>108,66</b>

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
<b>5</b>	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>								
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.201,90	2.262,56	102,75	2.204,25	2.378,10	106,15
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	860,5	794,13	92,29	872,2	809,86	92,85
2	Terciptanya Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	6.000,00	6.765,00	112,75	897	930	103,68
		Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun	kg/kapita/tahun	42,15	42,64	101,16	43,98	50,82	115,6
3	Tercapainya Peningkatan Kelas Kelompok Perikanan	Cakupan Bina Kelompok Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok	17	17	100	20	20	100
<b>Rata-Rata</b>						<b>101,79</b>			<b>103,656</b>
<b>6</b>	<b>Dinas Pertanian</b>								
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	Persen	2,8	0,8	28,57	2,97	3,04	102,36
2	Meningkatnya Produksi Perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi perkebunan	Persen	2,01	0,92	45,77	2,17	2,31	106,45
3	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase pertumbuhan produksi peternakan	Persen	0,85	1,42	167,06	1,1	1,3	118,18

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	
<b>Rata-Rata</b>						<b>80,47</b>			<b>109,00</b>	
<b>7</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>									
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73	75,46	103,37	74	69,8	94,32	
2	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh	Persen	20	16,77	83,85	20	18,92	94,6	
<b>Rata-Rata</b>						<b>93,61</b>			<b>94,46</b>	
<b>B</b>	<b>SEKTOR PEMBANGUNAN MANUSIA</b>			<b>Rata-Rata</b>			<b>100,64</b>	<b>Rata-Rata</b>		<b>98,76</b>
<b>8</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>									
1	Meningkatnya Angka Partisipasi	APK anak Usia Dini	Persen	60	63	105	62	63,3	102,1	
		APK SD/MI	Persen	100	93,81	93,81	100	107,7	107,7	
		APK SMP/MTs	Persen	103,4	107,73	104,19	103,4	108,46	104,89	
2	Meningkatnya Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Capaian Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah								
		a. SD/MI/Paket A	Persen	5,2	7,2	138,46	7,3	7,2	98,63	
		b. SMP/MTs/Paket B	Persen	5,5	3,6	65,45	5,75	3,6	62,61	

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
3	Meningkatnya nilai budaya adat tradisi yang memenuhi standar untuk dibina	Persentase nilai budaya adat tradisi yang memenuhi standar untuk dibina	Persen	60	33	55	65	33	50,77
<b>Rata-Rata</b>						<b>93,65</b>			<b>87,78</b>
<b>9 Dinas Kesehatan</b>									
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Persentase menurunnya angka stunting	Persen	14,7	16	91,88	14	21,6	64,81
		Angka Kematian Bayi	Kelahiran Hidup	4/1.000	4/1.000	100	4/1.000	5/1.000	80
		Angka Kematian Ibu	Kelahiran Hidup	90/ 100.000	192/ 100.000	46,87	90/ 100.000	90/ 100.000	100
2	Menurunnya angka penyakit menular dan tidak menular	Persentase penurunan penyakit menular	Persen	80	76	95	80	76,8	96
		Cakupan menurunnya penyakit tidak menular	Persen	25	22	88	25	23	92
		Persentase masyarakat ber-PHBS	Persen	35	6,7	19,14	35	35,78	102,23
3	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Persen	7-Jul	7-Jul	100	7-Jul	7-Jul	100



No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
4	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks	-	-	-	85,68	84,66	98,8
5	Meningkatnya Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	Persen	-	-	-	44	35,78	81,32
<b>Rata-Rata</b>						<b>77,27</b>			<b>90,57</b>
<b>10</b>	<b>Dinas Sosial</b>								
1	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	70	84,97	121,39	75	82,06	109,41
<b>Rata-Rata</b>						<b>121,39</b>			<b>109,41</b>
<b>11</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>								
1	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	Angka	2,27	2,24	101,32	2,2	2,28	103,63
2	Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	39/1000	36,15/1000	107,31	37/1000	38/1000	102,7
3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase penurunan keluarga pra sejahtera dan Prasejahtera I	Persen	2,5	2,34	106,4	2	1,65	82,5

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
<b>Rata-Rata</b>						<b>105,01</b>			<b>96,28</b>
<b>12</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	64,77	69,58	107,43	66,29	70,16	105,84
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	Persen	0,58	0,091	184,31	0,56	0,11	180,46
		Angka Kekerasan terhadap anak	Persen	0,067	0,09	65,67	0,057	0,12	-4,26
3	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	Persen	60	60	100	80	80	100
<b>Rata-Rata</b>						<b>114,35</b>			<b>95,51</b>
<b>13</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah</b>								
1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bima	Indeks Minat Baca		68	68,4	100,59	60	68,4	114
2	Meningkatnya Tata Kelola Arsip	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip		100	100	100	75	100	133
<b>Rata-Rata</b>						<b>100,295</b>			<b>123,5</b>

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
<b>13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat ( IKM )	Angka	98,63	89,12	90,36	98,63	90,42	91,68
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	91	92,11	101,22	91	98	107,69
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Kebijakan OPD	Persen	91	90	98,9	91	91	100
<b>Rata-Rata</b>						<b>96,83</b>			<b>99,79</b>
<b>14 Satuan Polisi Pamong Praja</b>									
1	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	90	89	98,89	92	89	96,73
2	Meningkatnya Penegakan peraturan Perundang-undangan	Persentase penegakan PERDA	Persen	92	88	95,65	92	92	100
<b>Rata-Rata</b>						<b>97,27</b>			<b>98,37</b>

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	
<b>15</b>	<b>Pemadam Kebakaran</b>									
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Non Kebakaran	Tingkat Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK)	Persen	90	90	100	90	100	111,11	
<b>Rata-Rata</b>						<b>100</b>			<b>111,11</b>	
<b>16</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>									
1	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	Persen	16,7	16,7	100	16,7	16,7	100	
<b>Rata-rata</b>						<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	
<b>C</b>	<b>SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>			<b>Rata-Rata</b>			<b>97,60</b>	<b>Rata-Rata</b>		<b>96,06</b>
<b>8</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>									
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi dan air minum layak	Persentase peningkatan rumah tangga bersanitasi layak	Persen	83,03	89,99	108,38	92,77	91,68	98,83	
		Persentase peningkatan rumah tangga penggunaan air bersih/air minum	Persen	76,02	83,23	109,48	86,01	84,95	98,77	
2	Meningkatnya kelancaran saluran drainase	Persentase peningkatan saluran drainase dalam kondisi baik	Persen	56,18	54,23	96,53	58,64	57,74	98,47	

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
3	Meningkatnya kualitas jaringan jalan kota	Persentase peningkatan panjang jalan kota dalam kondisi mantap	Persen	74,29	74,39	100,13	76,71	74,77	97,47
4	Meningkatnya luas area pertanian yang terlayani irigasi teknis	Persentase peningkatan luas area pertanian yang terlayani irigasi teknis	Persen	71,74	70,04	97,63	72,24	70,06	96,98
5	Meningkatnya ruang kota yang sesuai peruntukannya	Persentase peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya	Persen	79,44	97,73	123,02	100	99,98	99,98
<b>Rata-Rata</b>						<b>105,86</b>			<b>98,42</b>
<b>9</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>								
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	Persen	0,81	0,8	98,77	0,55	0,6	109,09
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan kawasan Permukiman kumuh	Persen	8,35	11,66	139,64	7,75	9,75	125,81
<b>Rata-Rata</b>						<b>119,21</b>			<b>117,45</b>
<b>10</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>								

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
1	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana	Persentase kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana	Persen	63,61	50,8	79,86	70,39	60,66	86,18/2
2	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan kedaruratan	Persen	< 85	81,59	81,59	85	81,59	81,59
<b>Rata-Rata</b>						<b>80,73</b>			<b>81,59</b>
<b>11</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>								
1	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan Sistem Informasi yang dikembangkan	Persen	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	100,00
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Predikat kategori A untuk PLID Kota Bima	Huruf	A	A	100,00	A	A	100,00
3	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi daerah	Persen	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00
4	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Persen	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	100,00
<b>Rata-Rata</b>						<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
<b>12</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>								

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	
1	Berkurangnya Pelanggaran Lalu Lintas	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	Persen	60,00	43,00	71,67	63,00	58,00	92,06	
2	Meningkatnya Fungsi Layanan Perparkiran dan Layanan Jasa Terminal	Persentase Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persen	60,00	45,00	75,00	80,00	63,00	78,75	
		Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Terminal	Persen	90,00	90,00	100,00	90,00	70,00	77,78	
<b>Rata-Rata</b>						<b>82,22</b>			<b>82,86</b>	
<b>D</b>	<b>SEKTOR PEMERINTAHAN</b>			<b>Rata-Rata</b>			<b>99,18</b>	<b>Rata-Rata</b>		<b>100,45</b>
<b>13</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>									
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Huruf	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	
2	Meningkatnya Efektifitas Penatausahaan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Meningkatnya Sistem Manajemen Aset	Persentase Aset yang tertib	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Persen	6,00	4,90	81,67	6,00	5,80	78,86	

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
<b>Rata-Rata</b>						<b>95,42</b>			<b>94,72</b>
<b>24</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>								
1	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Huruf	B	B	100	B	B	100
3	Meningkatnya fasilitasi Perumusan Kebijakan Pemerintahan Umum Daerah	Nilai LPPD	Huruf	Sangat baik	Sangat baik	100	sangat baik	sangat baik	100
4	Meningkatnya pengaruh kebijakan pelayanan publik terhadap nilai IKM	Skor rata-rata IKM	Nilai	85,00	83,42	98,14	85,00	83,42	98,14
5	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	Persen	100,00	89,00	89,00	100,00	89,00	89,00



No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
7	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Rata-Rata</b>						<b>98,57</b>			<b>98,57</b>
<b>25</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>								
1	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan DPRD	Porsentase Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan							
		a. Porsentase Pembahasan Perda	Kali	6,00	8,00	133,33	6,00	8,00	133,33
		b. Porsentase Pembahasan Anggaran	Kali	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
		c. Porsentase Pengawasan	Kali	27,00	27,00	100,00	27,00	27,00	100,00
		d. Porsentase Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	Kali	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	100,00
		e. Porsentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	Kali	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00
		Porsentase Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	Kali	86,00	87,00	101,16	86,00	87,00	101,16
<b>Rata-Rata</b>						<b>105,75</b>			<b>105,75</b>
<b>26</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan</b>								
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah		77,97	77,97	100,00	78,97	91,00	115,23
<b>Rata-Rata</b>						<b>100,00</b>			<b>115,23</b>
<b>27</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>								
1	Meningkatnya kompetensi ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Persen	50,00	45,00	90,00	50,00	45,00	90,00
<b>Rata-Rata</b>						<b>90,00</b>			<b>90,00</b>

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	
<b>28</b>	<b>Inspektorat</b>									
1	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil	Persen	60,98	76	124,63	60,98	76,00	124,63	
		Persentase tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	Persen	90	65,63	72,92	90,00	65,63	72,92	
		Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Tingkat/ Angka	berkembang (2,80)	berkembang (2,40)	85,71	berkembang (2,80)	berkembang (2,40)	85,71	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B	Persen	93,1	93,1	100,00	93,10	93,10	100,00	
2	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	Huruf	Level 3 (terdefinisi)	Level 3 (terdefinisi)	100,00	Level 3 (terdefinisi)	Level 3 (terdefinisi)	100,00	
<b>Rata-Rata</b>						<b>96,65</b>			<b>96,65</b>	
<b>E</b>	<b>SEKTOR SDA</b>			<b>Rata-Rata</b>			<b>74,86</b>	<b>Rata-Rata</b>		<b>75,16</b>

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
<b>7</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>								
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	Angka	50	24,55	49,10	50,00	28,75	57,50
		Indeks Kualitas Udara	Angka	80	85,35	106,69	82,00	87,33	106,50
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	Persentase Luas RTH Publik	Persen	11,01	11,21	101,82	11,34	11,30	99,65
		Persentase Luas Kawasan direhabilitasi	Persen	2,2	0,92	41,82	2,50	0,92	37,00
<b>Rata-Rata</b>						<b>74,86</b>			<b>75,16</b>
<b>Rata-rata keseluruhan OPD</b>						<b>91,80</b>			<b>96,88</b>

Sumber: Hasil Analisa

**Tabel 3.7**  
**Program Prioritas Pendukung Capaian per Sektor**

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>SEKTOR PEREKONOMIAN</b>									
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terlatih	persen	-	-		25,00	20,00	80,00	Tenaga Kerja
	Angka produktivitas tenaga kerja	persen	-	-	-	38,00	43,72	115,05	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diinput ke dalam Sistem Data Online (ODS)	persen	23,87	25,00	104,73	63,26	84,22	133,13	Koperasi dan UKM
	Persentase Usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	persen	24,00	10,00	41,67	12,06	15,90	131,84	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	persen	20,00	21,00	105,00	23,10	29,00	125,54	Koperasi dan UKM
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas	persen	6,41	7,40	115,44	34,10	43,40	127,27	

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	standarisasi dan sertifikasi								
	Persentase Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	persen	10,60	12,50	117,92	10,60	4,30	40,57	
	Persentase Usaha Mikro yang bermitra	persen	25,11	31,00	123,46	30,20	33,00	109,27	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perdagangan
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	persen	30,00	28,00	93,33	32,00	19,58	61,19	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	persen	46,72	53,96	115,50	47,02	37,32	79,37	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	persen	15,50	12,70	81,94	17,40	13,70	78,74	Perikanan dan Kelautan

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	12,70	15,50	122,05	13,60	14,60	107,35	Perikanan dan Kelautan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai investasi	persen	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	Penanaman Modal
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	12,70	15,50	122,05	13,60	14,60	107,35	Perikanan dan Kelautan
	Persentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	persen	10,00	6,67	66,70	12,00	6,60	55,00	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan ODTW	persen	32,00	32,00	100,00	32,00	32,00	100,00	Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	persen	30,00	32,00	106,67	32,00	40,00	125,00	Pariwisata

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisataaan yang terlibat	persen	33,00	25,00	75,76	33,00	28,00	84,85	Pariwisata
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan peningkatan SDM pertanian	persen	12,00	13,27	110,58	12,00	13,72	114,33	Pertanian
<b>Rata-Rata</b>					<b>93,90</b>			<b>97,66</b>	
<b>SEKTOR PEMBANGUNAN MANUSIA</b>									
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pengelolaan Pendidikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Pengembangan Kurikulum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pendidikan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang representatif	Persen	100,00	100,00	100,00	80,00	85,00	106,25	Perpustakaan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah saryankes yang berAKreditasi minimal madya	Angka	3/7 Saryankes	3/7 Saryankes	100,00	4 /7 Saryankes	4 /7 Saryankes	100,00	Kesehatan



No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar	Persen	90,00	85,00	94,44	95,00	90,00	94,74	Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang di bina	Persen	90,00	85,00	94,44	96,00	100,00	104,17	Kesehatan
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PENURUNAN (UNMET NEED)	Persen	8,72	8,72	100,00	8,60	8,60	100,00	Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	Persen	42,86	42,86	100,00	47,62	47,00	98,70	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi	Kka/ kap/ hari	263,00	268,00	101,90	266,00	320,00	120,30	Pangan
	Angka Ketersediaan Energi	Gram/ kap/ hari	66,68	74,17	111,23	67,17	75,14	111,87	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	persen	25,00	33,00	132,00	40,00	42,00	105,00	Pangan

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan ternak yang terinfeksi PHMS (%)	persen	12,00	10,00	83,33	12,00	14,00	116,67	Pertanian
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan	persen	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	persen	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	persen	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	Sosial

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	persen	73,00	73,00	100,00	73,00	75,00	102,74	Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian perencanaan tenaga kerja dengan realisasi	persen	-	-		95,00	94,00	98,95	Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terlatih	persen	-	-		25,00	20,00	80,00	Tenaga Kerja
	Angka produktivitas tenaga kerja	persen	-	-		38,00	44,00	115,79	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	persen	-	-		98,00	92,00	93,88	Tenaga Kerja
	Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	persen	-	-		100,00	100,00	100,00	Tenaga Kerja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100,00	98,98	98,98	100,00	92,50	92,50	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	persen	75,00	70,00	93,33	85,00	75,00	88,24	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kebudayaan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	persen	100,00	97,24	97,24	100,00	95,66	95,66	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Rata-Rata</b>					<b>90,28</b>			<b>99,12</b>	

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
<b>SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya	persen	33,10	21,61	65,29	34,70	22,40	64,55	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatkan kualitas permukiman masyarakat	persen	20,90	19,00	90,91	25,00	N/A		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah tangga pengguna air bersih/air minum layak	persen	45,00	38,60	85,78	47,80	47,20	98,74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	42,00	22,50	53,57	44,10	35,10	79,59	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	persen	35,10	34,90	99,43	38,90	32,97	84,76	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	persen	20,69	20,84	100,72	45,00	43,76	97,24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani	persen	67,00	66,49	99,24	70,00	71,54	102,20	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Jalan Kota dalam kondisi mantap	persen	21,00	23,00	109,52	23,20	23,00	99,14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Peningkatan luas area pertanian yang dilayani irigasi teknis	persen	20,00	14,20	71,00	22,00	22,73	103,32	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA J)	Persentase sarana dan prasarana yang telah sesuai standar	persen	-	-		90,00	90,00	100,00	Perhubungan
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pemenuhan sistem kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana	persen	63,61	50,80	79,86	70,38	60,66	86,19	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, BPBD
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan berkurangnya dampak bencana pertanian	persen	50,00	75,00	150,00	50,00	75,00	150,00	Pertanian
<b>Rata-rata</b>					<b>91,39</b>			<b>96,89</b>	
<b>SEKTOR PEMERINTAHAN</b>									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	persen	98,33	98,10	99,77	100,00	100,00	100,00	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
DAERAH KABUPATEN/KOTA									(Setda)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Setda)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	persen	77,97	100,00	128,25	78,97	100,00	126,63	Perencanaan
	Persentase hasil evaluasi dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	persen	77,97	100,00	128,25	78,97	100,00	126,63	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	persen	77,97	100,00	128,25	78,97	100,00	126,63	Perencanaan
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persen	77,97	100,00	128,25	78,97	100,00	126,63	

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	persen	77,97	100,00	128,25	78,97	100,00	126,63	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tingkat kepatuhan rasio penganggaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penurunan Risiko Pengawasan	persen	21,02	23,80	113,23	23,80	30,95	130,04	Pengawasan
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase peningkatan Nilai SAKIP dan LPPD Perangkat Daerah	persen	38,10	42,86	112,49	42,86	57,14	133,32	Pengawasan
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase PD yang menerapkan e-government dan pelayanan TIK	persen	75,00	75,00	100,00	85,00	85,00	100,00	Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD dan Jumlah Dokumen Laporan Pendapatan Daerah yang disusun	persen	56,00	56,00	100,00	60,00	60,00	100,00	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Keuangan)
PROGRAM	Jumlah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kependudukan



No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pendaftaran Penduduk								dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-17 Tahun	persen	93,00	95,80	103,01	95,00	99,30	104,53	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA J)	Persentase sarana dan prasarana yang telah sesuai standar	persen	-	-		90,00	90,00	100,00	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Predikat PLID Kota Bima	persen	B(80%)	B(80%)	100,00	A(100%)	A(100%)	100,00	Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Penanaman Modal
<b>Rata-rata</b>					<b>109,99</b>			<b>111,17</b>	
<b>SEKTOR SUMBERDAYA ALAM</b>									
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Menurunnya Pelanggaran Terhadap RPPLH	persen	60,00	60,00	100,00	60,00	50,00	83,33	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEGAHAN PENCEMARAN	Indeks Kualitas air	indeks	50,00	24,55	49,10	50,00	28,75	57,50	Lingkungan Hidup

No	Program	Indikator Kinerja	2021			2022			Urusan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA									
	Indeks Kualitas udara		80,00	85,35	106,69	82,00	87,33	106,50	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	persen	11,01	11,21	101,82	11,34	11,30	99,65	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KOTA	Persentase Meningkatnya Jumlah Ormas Sadar Lingkungan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani	persen	67,00	66,49	99,24	70,00	71,54	102,20	Lingkungan Hidup
<b>Rata-Rata</b>					<b>92,81</b>			<b>91,53</b>	

Sumber: Hasil Analisa

- **Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :**

1. Kinerja Angka Harapan Hidup tercapai melampaui target dengan tingkat capaian 100,97%. Realisasi kinerja Angka harapan hidup 70,83 tahun dari target 70,15 tahun. Keberhasilan capaian ini didukung oleh pengembangan sistem kesehatan dalam penanggulangan covid 19
2. Kinerja angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar tidak tercapai dengan realisasi hanya 98% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya angka putus sekolah sebagai akibat dari adanya sebagai anak yang harus membantu orang tua untuk bekerja dan keterbatasan kemampuan ekonomi orang tua.
3. Kinerja persentase peningkatan mutu pendidikan melampaui target dengan realisasi kinerja 33% dari target 31,17% atau dengan capaian 105,87%. Capaian ini tidak terlepas dari pengaruh faktor peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan maupun pengembangan kurikulum belajar serta sarana prasarana pendidikan.
4. Kinerja pengeluaran perkapita melampaui target dengan realisasi kinerja Rp.11.395.000 dari target Rp.11.225.000 atau dengan tingkat capaian 101,51%. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan program pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
5. Kinerja indeks ketahanan pangan melampaui target dengan realisasi kinerja sebesar 69,28 dari target 63,6 atau dengan tingkat capaian 108,93%. Meningkatnya indeks ketahanan pangan ini dipengaruhi meningkatnya daya beli masyarakat serta produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
6. Kinerja pertumbuhan PDRB belum mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi yaitu 2,08% dari target 3,6% atau dengan tingkat capaian 57,78%. Capaian kinerja pertumbuhan PDRB ini masih menggunakan angka pertumbuhan PDRB tahun 2021 yang diterbitkan oleh BPS Kota Bima pada tahun 2022. Adapun pertumbuhan PDRB tahun 2022 baru akan diterbitkan pada triwulan 2 tahun 2023. Adapun faktor yang berpengaruh ini adalah masih kuatnya dampak pandemi covid dan belum pulihnya aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat.

7. Kinerja angka kemiskinan tidak mencapai target dengan realisasi hanya 8,80% dari target 8,67% atau dengan tingkat capaian 98,52%. Belum tercapainya kinerja angka kemiskinan ini disebabkan dampak pandemi covid yang masih belum sepenuhnya pulih sehingga berpengaruh pada produktifitas masyarakat.
8. Kinerja tingkat pengangguran terbuka tidak mencapai target dengan realisasi kinerja sebesar 3,73 dari target 3,7 atau dengan tingkat capaian 99,19%. Belum tercapainya kinerja tingkat pengangguran terbuka ini disebabkan dampak pandemi covid yang masih belum sepenuhnya pulih sehingga berpengaruh pada produktifitas masyarakat
9. Kinerja Nilai SAKIP mencapai target yang diharapkan yaitu nilai B dengan tingkat capaian 100%. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan daerah beserta seluruh pimpinan perangkat daerah dalam membangun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
10. Kinerja Nilai LPPD juga mencapai target yang diharapkan yaitu dengan kategori sangat baik atau dengan capaian kinerja 100%. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan daerah beserta seluruh pimpinan perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
11. Capaian kinerja Opini BPK mencapai target yang diharapkan yaitu WTP atau dengan tingkat capaian 100%. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan daerah beserta seluruh pimpinan perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
12. Kinerja Rasio PAD terhadap APBD melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan kinerja sbesar 6,48% dari target 5,12% atau dengan tingkat capaian 126,56%. Meningkatnya capaian kinerja ini tidak terlepas dari optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada berbagai sektor.
13. Kinerja rata-rata skor indeks kepuasan masyarakat melampaui target yang diharapkan dengan realisasi 86,89 dari target sebesar 85% atau dengan tingkat capaian 102,22%. Pencapaian ini tidak terlepas dari semakin membaiknya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.
14. Kinerja Persentase kesesuaian tata ruang melampaui target yang

ditetapkan, yaitu dengan realisasi 98,8% dari target sebesar 98,2% atau dengan tingkat capaian 100,61%. Kesesuaian pemanfaatan ruang naik sebesar 0,60% ini didorong oleh faktor Kota Bima sudah memiliki Perda RTRW dan Perwali RDTRK untuk 2 kecamatan serta semakin meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang.

15. Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan realisasi 56,08% dari target sebesar 62% atau dengan tingkat capaian 90,45%. Hal ini disebabkan karena aktivitas masyarakat perkotaan belum sepenuhnya kembali normal pasca banjir 2021 dan kondisi kawasan hulu yang kritis sehingga berpengaruh terhadap kualitas air, kualitas tutupan lahan dan kualitas udara.
16. Kinerja persentase peningkatan Infrastruktur Daerah melampaui target dengan realisasi 49% dari target 42% atau dengan tingkat capaian 116,67%. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan kolaborasi lintas sektor dalam membangun infrastruktur perkotaan yang baik.
17. Kinerja indeks ketahanan daerah belum mencapai target dengan realisasi kinerja sebesar 74 dari target 83,91 atau dengan tingkat capaian 88,19%. Kondisi ini disebabkan oleh dokumen kesiap-siagaan bencana seperti dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan dokumen rencana kontigensi yang sudah habis masa berlakunya dan belum disusun dokumen rencana yang baru.
18. Kinerja penurunan angka kriminalitas melampaui target dengan realisasi 52% dari target 31% atau dengan tingkat capaian 167,74%. Kondisi ini didukung oleh adanya kolaborasi lintas sektor termasuk dengan instansi vertikal dalam membangun stabilitas dan kondusifitas daerah.
19. Kinerja Persentase penurunan Angka konflik sosial melampaui target dengan realisasi 16,7% persen dari target 13,5% atau dengan tingkat capaian 123,70%. Capaian kinerja ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah masing-masing serta terbangunnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor.
20. Kinerja Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina belum mencapai target dengan realisasi 1,6% dari target 2,4%

atau dengan tingkat capaian sebesar 66,67%. Capaian kinerja ini dipengaruhi oleh belum optimalnya peran lembaga adat dan budaya dalam melestarikan warisan budaya.

21. Kinerja indeks kerukunan umat beragama belum mencapai target dengan realisasi sebesar 72,39 dari target 84 atau dengan tingkat capaian 86,18. Capaian kinerja ini tidak terlepas dari belum optimal peran FKUB dalam memperkuat kerukunan umat beragama.

#### - **Perbandingan antara target dan realisasi sasaran perangkat daerah tahun 2022**

Adapun perbandingan realisasi sasaran perangkat daerah per sektor pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sektor Perekonomian (Mitra Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur). Sasaran perangkat daerah sektor perekonomian diampu oleh 7 (tujuh) perangkat daerah terdiri dari 16 (enam belas) sasaran dengan 22 (dua puluh dua) indikator. Disektor perekonomian ada 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran perangkat daerah mencapai/melampaui target yang ditetapkan sementara 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran perangkat daerah belum memenuhi target, namun untuk rata-rata capaian indikator sektor Perekonomian keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya.
2. Sektor Sumberdaya Alam (Mitra Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur). Di tahun 2022 Sasaran Perangkat Daerah sektor Sumberdaya Alam diampu oleh 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator, dengan capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran perangkat daerah melampaui target yang ditetapkan sementara 3 (tiga) indikator kinerja sasaran perangkat daerah tidak mencapai target, namun untuk rata-rata capaian indikator sektor SDA keseluruhan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
3. Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan (Mitra Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur). Sasaran perangkat daerah

sektor infrastruktur dan kewilayahan dalam pembahasan ini hanya menyajikan sektor infrastruktur saja dengan pertimbangan bahwa unsur kewilayahan (Kecamatan) baru mulai didorong untuk membangun pelaporan akuntabilitas kinerja. Sektor Infrastruktur terdiri dari 5 (lima) perangkat daerah dengan 15 (lima belas) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Terdapat 6 indikator kinerja sasaran yang mencapai/melampaui target dan 11 indikator kinerja sasaran perangkat daerah yang belum mencapai target tahun 2022. Untuk capaian rata-rata keseluruhan sektor Infrastruktur dan pengembangan wilayah pada tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 96.06% dan terjadi sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya.

4. Sektor pemerintahan (Mitra Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia). Sasaran perangkat daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia pada tahun 2022 diampu oleh 6 (enam) perangkat daerah dengan 18 (delapan belas) sasaran dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja. Terdapat 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran yang mencapai/melampaui target dan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran perangkat daerah yang belum mencapai target. Untuk capaian rata-rata keseluruhan sektor pemerintahan pada tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan diangka 100.45% dan terjadi peningkatan yang konstan dibanding tahun sebelumnya.
5. Sektor Pembangunan Manusia (Mitra kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia). Pada tahun 2022, sasaran perangkat daerah sektor pembangunan manusia dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) perangkat daerah dengan 24 (dua puluh empat) sasaran dan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja. Terdapat 19 (sembilan belas) indikator kinerja sasaran yang mencapai/melampaui target yang ditetapkan dan 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran perangkat daerah yang belum mencapai target. Untuk capaian rata-rata keseluruhan sektor pembangunan manusia pada tahun 2022 sebesar 98.76% dan jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya menunjukkan terjadinya penurunan hampir 2% .

### 3.1.3. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran

Capaian indikator kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan indikator Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2022 dibandingkan capaian tahun sebelumnya**

No	Indikator sasaran	2021			2022			Target akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap target akhir Renstra (2023)
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	77,97%	86,26%	110,63%	78,97%	98,36%	124,55%	80	122,95%

Sumber: Hasil Analisa

Realisasi tahun 2022 sebesar 98,36% telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 78,97%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 124,55% . Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi kinerja tahun 2022 menurun sebesar 13,92%. Meskipun pengaruh pandemi covid 19 yang belum berakhir dan menyebabkan beberapa capaian indikator makro pembangunan tidak tercapai, namun kinerja secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup berarti.

- **Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran program Bappeda Litbang tahun 2022 adalah sebagai berikut :**

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Program Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2022**

Program PD	Indikator Program PD	Formula indikator	Satuan	2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian	Rata-rata capaian target sasaran daerah, sasaran PD dan Program sektor perekonomian	%	77,97	69,65	78,97	95,97



Program PD	Indikator Program PD	Formula indikator	Satuan	2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Data:					
		Capaian target sasaran daerah sektor perekonomian	%		42,62		98,70
		Capaian target sasaran PD sektor perekonomian	%		72,42		91,55
		Capaian program sektorperekonomian	%		93,90		97,66
	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sumberdaya alam (SDA)</b>	<b>Rata-rata capaian target sasaran daerah, sasaran PD dan Program SDA</b>	%	<b>77,97</b>	<b>84,70</b>	<b>78,97</b>	<b>85,71</b>
		Data:					
		Capaian target sasaran daerah sektor SDA	%		86,44		90,45
		Capaian target sasaran PD sektor SDA	%		74,86		75,16
		Capaian program sektor SDA	%		92,81		91,53
	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan</b>	<b>Rata-rata capaian target sasaran daerah, sasaran PD dan Program infrastruktur dan kewilayahan</b>	%	<b>77,97</b>	<b>82,34</b>	<b>78,97</b>	<b>103,75</b>
		Data:					
		Capaian target sasaran daerah sektor infrastruktur dan kewilayahan	%		58,02		118,30
		Capaian target sasaran PD sektor infrastruktur dan kewilayahan	%		97,60		96,06
		Capaian program sektor infrastruktur dan kewilayahan	%		91,39		96,89
	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan</b>	<b>Rata-rata capaian target sasaran daerah, sasaran PD dan Program Pemerintahan</b>	%	<b>77,97</b>	<b>103,31</b>	<b>78,97</b>	<b>100,39</b>
		Data:					

Program PD	Indikator Program PD	Formula indikator	Satuan	2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Capaian target sasaran daerah sektor Pemerintahan	%		100,75		103,96
		Capaian target sasaran PD sektor Pemerintahan	%		99,18		100,45
		Capaian program sektor Pemerintahan	%		109,99		111,17
	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja pembangunan manusia</b>	<b>Rata-rata capaian target sasaran daerah, sasaran PD dan Program Pembangunan Manusia</b>	%	<b>77,97</b>	<b>104,08</b>	<b>78,97</b>	<b>105,32</b>
		Data:					
		Capaian target sasaran daerah sektor Pembangunan Manusia	%		121,33		118,07
		Capaian target sasaran PD sektor Pembangunan Manusia	%		100,64		98,76
		Capaian program sektor Pembangunan Manusia	%		90,28		99,12

Sumber: Hasil Analisa

## 1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan yang tersebar di 2 bidang/sektoral yang ada di Bappeda Litbang, yaitu :

### a. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Pada Tahun 2022 realisasi capaian kinerja untuk program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sektor koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) mencapai 126.63% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. dari target yang telah ditetapkan sebesar 78.97%. Capaian dari sektor Ekonomi dan SDA ini termasuk dalam kategori tinggi mengingat

tahun 2022 merupakan masa transisi dan belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19. Kinerja Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur diukur menggunakan rata-rata capaian target sasaran RPJMD, sasaran Perangkat daerah dan program sektor perekonomian, sektor sumber daya alam serta sektor Infrastruktur dan kewilayahan.

Komponen pertama adalah capaian target sasaran Pemerintah Kota Bima dari sektor perekonomian meliputi 4 sasaran dan 4 indikator, yaitu:

1. Meningkatnya daya beli masyarakat

Peningkatan daya beli masyarakat ditandai dengan meningkatnya indikator pengeluaran perkapita masyarakat (perorang/ tahun), ditahun 2022 pemerintah men-targetkan pengeluaran perkapita penduduk sebesar Rp 11.225.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.395.000 atau mencapai 101.51% .

2. Meningkatnya Ketahanan Pangan

Meningkatnya ketahanan pangan diukur dengan pencapaian indikator Indeks Ketahanan Pangan. Di tahun 2022 ditargetkan indeks ketahanan pangan diangka 63.6 dan terealisasi diangka 69.28 naik 5.68 poin dari target, atau mencapai 108.93%,.

3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ditandai dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang pada tahun 2022 ditargetkan 3.6 poin, terealisasi dibawah target diangka 2.08 poin atau capaian kinerja turun sebesar 57.78%. Penurunan pertumbuhan PDRB yang tidak sesuai target ini diakibatkan tahun 2022 merupakan masa pemulihan/ transisi pandemi Covid-19 yang mencapai puncak nya ditahun 2021.

4. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator untuk mengukur Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah digunakan Rasio PAD terhadap APBD yang pada tahun 2022 ditargetkan diangka 5.12 dan terealisasi sebesar 6.48 poin

atau capaian sebesar 126.56%. naik sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 target dari sektor ekonomi rata-rata mengalami kenaikan yang konstan, kecuali pada sub sektor pertumbuhan ekonomi yang masih belum pulih sepenuhnya, dan tetap dibawah target seperti yang ditunjukkan indikator pertumbuhan PDRB yang hanya mencapai angka 57.78%. Tetapi hal ini bisa dimaklumi karena pertumbuhan ekonomi global belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Dari hasil perhitungan dapat dilihat untuk rata-rata pencapaian sektor ekonomi selama kurun tahun 2022 diangka 98.70%%.

Komponen kedua adalah capaian target sasaran Pemerintah Kota Bima dari sektor SDA (Sumber Daya Alam) dengan 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Selama kurun 2022, kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan. Target indeks ditahun 2022 sebesar 62 poin hanya dapat terealisasi sebesar 90.45% atau *miss* 5.92 poin.

Komponen ketiga merupakan capaian target sasaran Pemerintah Kota Bima dari sektor Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan meliputi 4 indikator, yaitu:

1. Meningkatnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

Peningkatan ketaatan terhadap rencana tata ruang dapat diukur berdasarkan persentase kesesuaian tata ruang. Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bima men-targetkan sebesar 98.20% dan terealisasi sebesar 98.80% atau capaian kinerja terhadap ketaatan rencana tata ruang sebesar 100.61%, naik 0.20% dari tahun sebelumnya.

2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Peningkatan kualitas infrastruktur daerah ditandai dengan persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik. Untuk tahun 2022 ditargetkan diangka 42% terealisasi melebihi

target sebesar 49% atau capaian kinerja untuk peningkatan kualitas infrastruktur daerah melebihi target sebesar 116.67%. Nilai indikator ini menunjukkan bahwa kinerja OPD pengampu dalam pengimplementasian program dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk mendongkrak realisasi hasil dari yang ditargetkan.

### 3. Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana

Indeks Ketahanan Daerah merupakan indikator untuk mengukur peningkatan ketahanan terhadap bencana. Pada tahun 2022 indeks ketahanan daerah ditargetkan sebesar 83.91 poin dan terealisasi sebesar 74 poin atau menurun sebesar 9.91 poin sehingga capaian kinerja ditahun 2022 hanya sebesar 88.91%.

### 4. Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban

Persentase penurunan Angka kriminalitas pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 31% dan terealisasi sebesar 52% atau capaian kinerja dalam usaha untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban diwilayah kota Bima naik signifikan sebesar 167.74%. ini menunjukkan bahwa implementasi program kerja perangkat terkait pelaksanaan program kamtibmas selama kurun tahun 2022 mencapai hasil yang menggembirakan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 target dari sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah rata-rata mengalami kenaikan yang cukup signifikan.dibanding capaian tahun 2021, dari hasil perhitungan dapat dilihat rata-rata pencapaian sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah selama kurun tahun 2022 sebesar 112.73%.

## **b. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Pada tahun 2022 realisasi capaian kinerja untuk program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sektor koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mencapai angka sebesar 126.63% dengan

realisasi kinerja sebesar 100%. dari target yang telah ditetapkan sebesar 78.97%. Tingginya Capaian kinerja dari sektor ini menunjukkan bahwa implementasi program-program terkait urusan pemerintahan dan pembangunan manusia dilaksanakan secara sistematis dan terukur. Kinerja Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia diukur menggunakan rata-rata capaian target sasaran RPJMD, sasaran Perangkat daerah dan program sektor pemerintahan dan pembangunan manusia.

Komponen keempat merupakan capaian target sasaran Pemerintah Kota Bima dari sektor Pemerintahan dengan 1 sasaran dan 3 indikator, yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan indikator nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Skor LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kota Bima pada tahun 2022 men-targetkan perolehan Nilai SAKIP B nilai 69 poin dan terealisasi B dengan nilai 68.69 poin atau capaian kinerja sebesar 99.55%. Untuk Skor LPPD ditargetkan diangka 3,2200 (sangat tinggi) dan terealisasi (sangat baik) diangka 3,2595 atau capaian kinerja sebesar 101.23%. Sedangkan capaian kinerja untuk Opini BPK sebesar 100% dari yang ditargetkan WTP dan kembali berhasil meraih WTP ditahun 2022.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 target dari sektor pemerintahan dapat dipertahankan walaupun sedikit mengalami penurunan. Dari hasil perhitungan dapat dilihat rata-rata pencapaian sektor pemerintahan selama kurun tahun 2022 sebesar 100.26% atau sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0.84%.

Komponen kelima merupakan capaian target sasaran Pemerintah Kota Bima dari sektor pembangunan manusia dengan 5 sasaran dan 6 indikator, yaitu

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diukur dengan capaian angka harapan hidup. Pada tahun 2022 angka harapan hidup ditargetkan sebesar 70.15 poin dan terealisasi sebesar 70.83 poin atau naik 0.68 poin dari target, sehingga dapat dihitung bahwa capaian kinerja selama kurun tahun 2022 sebesar 100.97%

2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dapat diukur dengan 2 indikator, yaitu angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar dan persentase peningkatan mutu pendidikan, ditahun 2022 angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar ditargetkan 100 poin dan terealisasi sebesar 98 poin, dari perhitungan didapat capaian kinerja untuk angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar sebesar 98%, sedangkan untuk persentase peningkatan mutu pendidikan, capaian kinerja selama tahun 2022 sebesar 105.87% dari yang ditargetkan sebesar 31.17% dan mampu direalisasikan sebesar 33%.

3. Menurunnya Angka Kemiskinan

Untuk mengukur capaian penurunan kemiskinan digunakan indikator angka kemiskinan, pada tahun 2022 angka kemiskinan ditargetkan 8.67 poin dan terealisasi di angka 8.80, ini menunjukkan selama masa transisi pandemi Covid-19 peningkatan kemiskinan di wilayah kota Bima sebesar 0.13 poin atau capaian kinerja sebesar 98.52%, namun naiknya angka kemiskinan selama pemulihan pandemi Covid-19 dapat dimaklumi. Untuk kinerja perangkat terkait selama masa transisi ini patut di apresiasi karena mampu menekan naiknya angka kemiskinan mengingat efek perlambatan ekonomi yang masih terjadi secara global.

#### 4. Meningkatnya Kesempatan Kerja

Tingkat pengangguran terbuka ditahun 2022 mengalami penurunan yang konstan seperti tahun sebelumnya. Untuk kota Bima sendiri, selama kurun tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka turun sebesar 0.03 poin dari yang ditargetkan 3.76 poin dan dapat terealisasi 3.73 poin atau capaian kinerja sebesar 100.8%.

#### 5. Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama

Peningkatan pengamalan ajaran agama dapat diukur dengan indeks kerukunan beragama dikota Bima. Ditahun 2022 indeks kerukunan beragama ditargetkan sebesar 84 poin namun hanya terealisasi sebesar 67.46 poin atau kurang 16.54 poin dari yang ditargetkan, sehingga dari perhitungan didapat capaian kinerja sebesar 86.18%.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 target dari sektor pembangunan manusia dapat dipertahankan walaupun sedikit mengalami penurunan. Dari hasil perhitungan dapat dilihat rata-rata pencapaian sektor pembangunan manusia selama kurun tahun 2022 sebesar 118.07% atau sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 3.26%.

## **2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Realisasi capaian kinerja untuk Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ditahun 2022 mencapai angka sebesar 126.63% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. dari target yang telah ditetapkan sebesar 78.97%. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dar 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Kegiatan pertama merupakan penyusunan perencanaan dan pendanaan dengan sub kegiatan meliputi, (1) Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, (2) Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dan (3) Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah yang masing-masing



kegiatan dan sub kegiatan ditargetkan pada angka 78.97%. Kegiatan kedua merupakan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah dengan sub kegiatan meliputi: (1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota; (2) Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah; dan (3) Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah yang masing-masing kegiatan dan sub kegiatan juga ditargetkan pada angka 78.97%.

Tingginya Capaian kinerja dari program ini menunjukkan bahwa implementasi program terkait urusan perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Daerah dilakukan secara konsisten dan efektif. Kinerja perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Daerah diukur menggunakan rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah. Dengan tercapainya sasaran program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tersebut bukan berarti bahwa kinerja akan berjalan ditempat, namun untuk dijadikan pendorong untuk capaian target yang lebih baik lagi karena regulasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan akan selalu berkembang.

### **3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Target pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program penelitian dan pengembangan daerah pada tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi kinerja sebesar 75%. Sehingga pencapaian kinerja untuk program ini sebesar 75%.

Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi. Kinerja program Program Penelitian dan Pengembangan daerah diukur menggunakan indikator Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan. Indikator tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan diukur dengan formula  $(\text{Jumlah penelitian yang sudah ditindaklanjuti} / \text{jumlah penelitian yang dilakukan}) \times 100\%$ . Dari 8 kajian yang ada di Bappeda Litbang sebanyak 8 kajian (100%) sudah ditindaklanjuti, namun demikian monitoring terhadap tindak lanjut hasil kajian masih terus dilakukan.

### 3.1.4. Analisa Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Analisa capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2022 difokuskan pada kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran program dan sasaran strategis Bappeda Litbang. Adapun gambaran capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana di gambarkan pada tabel 3.10 berikut ini.

**Tabel 3.10.**

**Tabel Analisis Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>78,97%</b>	<b>96.61%</b>	
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>78,97%</b>	<b>100%</b>	<b>126,63%</b>
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita Acara forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah	1	1	100%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita acara musrenbang kabupaten/kota	1	1	100%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	2	100%
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya</b>	<b>78,97%</b>	<b>100%</b>	<b>126,63%</b>
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2	2	100%
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	1	1	100%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4	4	100%
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	<b>78,97%</b>	<b>100%</b>	<b>126,63%</b>

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	<b>78,97%</b>	<b>100%</b>	<b>126,63%</b>
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8	8	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	8	8	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8	8	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	8	8	100%
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan SDA</b>	<b>78,97%</b>	<b>96.12%</b>	
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>78,97%</b>	<b>100%</b>	<b>126,63%</b>
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	5	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	5	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3	3	100%

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3	3	100%
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>78,97%</b>	<b>96.12%</b>	
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan</b>	<b>78,97%</b>	<b>100%</b>	<b>126,63%</b>
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5	5	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5	5	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5	5	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5	5	100%
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	0	0

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1	1	100%
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	1	100%
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase peningkatan inovasi daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan perencanaan dibidang teknologi dan inovasi	1	1	100%
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	3	3	100%

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Litbang Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 3.10 tersebut diatas bahwa terdapat 11 sub kegiatan yang tidak mencapai target yaitu sub kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Sedangkan sub kegiatan yang lain seluruhnya mencapai target 100%. Pencapaian target kegiatan dan sub kegiatan ini dalam perhitungan dan analisisnya tidak berkaitan langsung dengan dengan pencapaian indikator program karena formula indikator pada program lebih fokus pada perhitungan tingkat capaian sasaran strategis daerah setiap sektor, capaian sasaran strategis perangkat daerah per sektor serta capaian program pembangunan daerah per sektor.

Sedangkan pada kegiatan dan sub kegiatan lebih fokus pada perangkat daerah yang diasistensi serta perangkat daerah yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi capaian kinerja khususnya pada Program Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

### **3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja Bappeda Litbang Kota Bima di tahun 2022, antara lain:

1. Inkonsistensi data sebagai basis intervensi program-program yang akan implementasikan dilapangan.
2. Masih rendahnya quality Hasil penelitian dan inovasi daerah yang dapat diimplemetasikan dalam penyusunan perencanaan.
3. Sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah tidak dapat dilakukan secara optimal karena regulasi perencanaan dan penganggaran dari pemerintah pusat yang selalu berubah-ubah.
4. Masih adanya ketidaksepahaman terkait perencanaan dan penganggaran antara otoritas institusi perencanaan dan pemegang otoritas penganggaran, sehingga sangat sulit untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
5. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan.

Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja tersebut, pada tahun 2022 Bappeda Litbang Kota Bima tetap dapat meraih target kinerja yang baik. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

2. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Bima
3. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan
4. Ketersediaan data-data pendukung dan analisa dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program dan kegiatan antara Bappeda Litbang dengan Perangkat Daerah pengampu Program.

Dari hasil kinerja masing-masing bidang yang berhasil mencapai kinerja sasaran strategis, Bappeda Litbang memberikan penghargaan kepada bidang-bidang yang telah mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja baik capaian kinerja sasaran daerah, sasaran perangkat daerah, maupun sasaran program serta juga memberikan penghargaan kepada Sekretariat sebagai pendukung dalam pencapaian sasaran strategis Bappeda Litbang.

### 3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik (124,55%) dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi dan juga ada efisiensi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.11 berikut:

**Tabel 3.11.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Realisasi %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kinerja perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	78.97%	98,36%	124.55%	Rp1,941,485,000	Rp1,722,655,677	88.73%

	Belanja gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				Rp3,812,695,810	Rp3,720,844,009	97.59%
	Belanja operasional Utama							
	Belanja operasional Pendukung	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				Rp1,268,557,580	Rp1,251,845,595	98.68%
	<b>Total Belanja</b>					<b>Rp7,022,738,390</b>	<b>Rp6,695,345,281</b>	<b>95.34%</b>

Sumber: Hasil Analisa



**Tabel 3.12.****Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2022**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>REALISASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja setiap sektor	96.12%
2		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	96.61%
3		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	63.24%
4		Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tercapainya Indikator Kinerja layanan Penunjang Perangkat Daerah	97.86%

Sumber: Hasil Analisa

Pada tabel 3.12 menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Seluruh program utama memiliki realisasi anggaran yang baik. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Efisiensi anggaran pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah sebesar 3.88% dari total alokasi anggaran atau sebesar Rp48,313,321, untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah besaran efisiensi sebesar 3,88%, atau senilai Rp8,667,599, Efisiensi terbesar pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 36.76% , atau sebesar Rp161,848,403 efisiensi tersebut terdapat pada seluruh kegiatan program, yaitu kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

**Tabel 3.13.**  
**Analisis Efisiensi**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>% Capaian Kinerja (≥100%)</b>	<b>% Penyerapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	124.55%	95.34%	29,21%

Sumber: Hasil Analisa

Pada Tabel 3.14 menampilkan secara lengkap Analisis Efisiensi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Litbang dalam mendukung capaian sasaran strategis RPJMD Pemerintah Kota Bima yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk tahun 2022 Bappeda Litbang Kota Bima telah merumuskan 3 Program utama pencapaian sasaran strategis yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan masuk kriteria pencapaian yang tinggi karena realisasi kinerja diangka 100% dari yang ditargetkan 78.97% sehingga didapat capaian kinerja sebesar 126.63%. dari anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp255,445,000 dan realisasi belanja sebesar Rp246,777,401 atau 96.61% dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini mencapai **Efisiensi**.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 3 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan juga masuk kriteria pencapaian yang tinggi karena dari target sebesar 78.97% mampu direalisasikan 100% atau capaian kinerja sebesar 126.63%. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1,245,729,500 dengan realisasi belanja sebesar Rp1,197,416,179 atau 96.12% sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini mencapai **Efisiensi** yang baik.

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari 4 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, dari target 63,24% hanya mampu direalisasikan sebesar 75% atau capaian kinerja sebesar 63,24%. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp440,310,500 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp278,462,097 atau 63.24% sehingga disimpulkan bahwa belanja anggaran untuk pelaksanaan program ini **Kurang Efisien** karena tidak mampu memenuhi capaian yang telah ditargetkan.

**Tabel 3.14.**  
**Analisis Efisiensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Litbang**

Urusan		Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perencanaan							Rp1,941,485,000	Rp1,722,655,677	88.73%	
	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		78,97%	96,61%		Rp255,445,000	Rp246,777,401	96.61%	Efisien
	F	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	78,97%	100%	126,63%	Rp120,692,000	Rp120,636,000	99.95%	Efisien
	1	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita Acara forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah	1	1	100%	Rp31,847,000	Rp31,847,000	100.00%	Efisien
	2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita acara musrenbang kabupaten/kota	1	1	100%	Rp38,440,000	Rp38,384,000	99.85%	Efisien
	3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	2	100%	Rp50,405,000	Rp50,405,000	100.00%	Efisien
	G	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	78,97%	100%	126,63%	Rp134,753,000	Rp126,141,401	93.61%	Efisien
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan	2	2	100%	Rp27,788,000	Rp27,447,200	98.77%	Efisien

Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi
	Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	pembangunan							
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	1	1	100%	Rp25,905,000	Rp25,755,360	99.42%	Efisien
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4	4	100%	Rp81,060,000	Rp72,938,841	89.98%	Efisien
3	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	<b>78,97%</b>	<b>96,12%</b>		<b>Rp371,380,000</b>	<b>Rp344,990,531</b>	<b>92.89%</b>	Efisien
H	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	<b>78,97%</b>	<b>100%</b>	<b>126,63%</b>	<b>Rp371,380,000</b>	<b>Rp344,990,531</b>	<b>92.89%</b>	Efisien
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8	8	100%	Rp107,672,000	Rp101,211,473	94.00%	Efisien
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	8	8	100%	Rp22,810,000	Rp22,575,000	98.97%	Efisien
3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8	8	100%	Rp218,088,000	Rp199,864,058	91.64%	Efisien
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	8	8	100%	Rp22,810,000	Rp21,340,000	93.56%	Efisien

Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	
	3	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan SDA	78,97%	100%	126%	Rp369,882,800	Rp356,411,272	96.36%	Efisien
	I	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	78,97%	100%	126,63%	Rp369,882,800	Rp356,411,272	96.36%	Efisien
	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	5	100%	Rp175,916,900	Rp175,869,677	99.97%	Efisien
	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	5	100%	Rp21,172,800	Rp21,022,800	99.29%	Efisien
	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3	3	100%	Rp160,855,100	Rp147,685,795	91.81%	Efisien
	4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3	3	100%	Rp11,938,000	Rp11,833,000	99.12%	Efisien
	3	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Infrastruktur dan Kewilayahan	78,97%	100%	126%	Rp504,466,700	Rp496,014,376	98.32%	Efisien
	J	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan	78,97%	100%	126,63%	Rp504,466,700	Rp496,014,376	98.32%	Efisien

Urusan		Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi
	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5	5	100%	Rp308,473,500	Rp302,131,900	97.94%	Efisien
	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5	5	100%	Rp21,395,400	Rp20,045,400	93.69%	Efisien
	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5	5	100%	Rp153,410,000	Rp152,706,276	99.54%	Efisien
	4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5	5	100%	Rp21,187,800	Rp21,130,800	99.73%	Efisien
	4	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>100%</b>	<b>63,24%</b>	<b>63,24%</b>	<b>Rp440,310,500</b>	<b>Rp278,462,097</b>	<b>63.24%</b>	efisien
	K	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	100%	0	0	Rp112,500,000	Rp1,820,000	1.62%	tidak efisien
	1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	0	0	Rp112,500,000	Rp1,820,000	1.62%	tidak efisien
	L	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	100%	100%	100%	Rp16,046,000	Rp12,810,000	79.83%	efisien
	1	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1	1	100%	Rp16,046,000	Rp12,810,000	79.83%	efisien

Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi
M	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	100%	100%	100%	Rp16,046,000	Rp15,731,000	98.04%	efisien
1	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	1	100%	Rp16,046,000	Rp15,731,000	98.04%	efisien
N	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan inovasi daerah	100%	100%	100%	Rp295,718,500	Rp248,101,097	83.90%	efisien
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi	1	1	100%	Rp224,947,000	Rp196,437,517	87.33%	efisien
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	3	3	100%	Rp70,771,500	Rp51,663,580	73.00%	efisien

Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik saat ini dituntut berjalan dengan efektif dan efisien. Masyarakat sangat berharap terhadap tingginya tingkat respon dan layanan yang semakin bersifat terbuka, transparan, dan akuntabel. Penyesuaian terhadap kondisi demikian dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi sejalan dengan upaya pemenuhan jalannya pemerintahan dalam kerangka pembangunan ekosistem e-Government dan perwujudan smart city.

Dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, Kota Bima telah menginisiasi atau meresmikan lebih dari 80 inovasi, dan sebanyak 30 inovasi diikutsertakan dalam sistem *Innovative Government Award* (IGA) pada tahun 2022.

### 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja pada tahun 2022 sebesar Rp. 6,695,345,281 atau mencapai 95,34% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.7,022,738,390. Realisasi anggaran tersebut didalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Rincian anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp3,812,695,810 dan terealisasi sebesar Rp3,720,844,009 atau mencapai 97.59%, selanjutnya alokasi anggaran untuk belanja non-gaji sebesar Rp3,210,042,580 dan terealisasi sebesar Rp2,974,501,272 atau mencapai 92.66%.

Alokasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp1,941,485,000,- yang terdiri dari Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp1,722,655,677,- atau mencapai 88,73%, sedangkan untuk alokasi anggaran program/kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp1,268,557,580 dapat terealisasi sebesar Rp1,251,845,595 atau mencapai 98.68%.

Realisasi anggaran terbesar pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp246,777,401 atau mencapai 96.61% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp255,445,000. Program ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp120,692,000 dapat direalisasikan sebesar Rp120,636,000 atau mencapai 99.95%, selanjutnya kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp126,141,401 atau mencapai 93.61% dari total anggaran sebesar Rp134,753,000. Sementara itu untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah total alokasi anggaran dari 3 kegiatan mencapai Rp1,245,729,500 dan terealisasi sebesar Rp1,197,416,179 atau mencapai 96.12%, untuk



kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia realisasi capaian belanja anggaran sebesar 92.89% dengan rincian, alokasi anggaran sebesar Rp371,380,000 dengan penyerapan sebesar Rp344,990,531. Selanjutnya untuk kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA realisasi belanja anggaran mencapai 96.36% dengan rincian, alokasi anggaran sebesar Rp369,882,800 dan dapat realisasikan sebesar Rp356,411,272. Untuk bidang Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan alokasi anggaran sebesar Rp504,466,700 dan terealisasi sebesar Rp496,014,376 atau sebesar 98.32%.

Sementara itu untuk penyerapan anggaran terendah ada pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang penyerapan anggaran hanya sebesar 63.24%, anggaran yang dialokasikan untuk Program ini sebesar Rp440,310,500 dan hanya mampu direalisasikan sebesar Rp278,462,097. Dengan rincian untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan capaian penggunaan anggaran diangka 1.62%, untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dialokasikan anggaran sebesar Rp16,046,000 dengan realisasi sebesar Rp12,810,000 atau sebesar 79.83%, selanjutnya kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan mampu menyerap anggaran diangka 98.04% dengan rincian belanja yang dianggarkan sebesar Rp16,046,000, dan terealisasi sebesar Rp15,731,000, untuk kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi alokasi anggaran sebesar Rp295,718,500 dan mampu diserap senilai Rp248,101,097 atau capaian belanja anggaran sebesar 83.90%.

**Tabel 3.15.**  
**Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda Tahun 2022**

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3,812,695,810	Rp3,720,844,009	97.59%

**Tabel 3.16.**  
**Realisasi Anggaran Belanja Non Gaji Bappeda Tahun 2022**

	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
		<b>Rp3,210,042,580</b>	<b>Rp2,974,501,272</b>	<b>Rp235,541,308</b>	<b>92.66%</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp1,268,557,580</b>	<b>Rp1,251,845,595</b>	<b>Rp16,711,985</b>	<b>98.68%</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp90,003,000</b>	<b>Rp89,003,000</b>	<b>Rp1,000,000</b>	<b>98.89%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp4,730,000	Rp4,730,000	Rp0	100.00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp4,035,100	Rp4,035,100	Rp0	100.00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp5,550,000	Rp5,550,000	Rp0	100.00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp3,520,000	Rp3,520,000	Rp0	100.00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp8,150,000	Rp8,150,000	Rp0	100.00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp3,820,000	Rp3,820,000	Rp0	100.00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp60,197,900	Rp59,197,900	Rp1,000,000	98.34%
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp148,440,000</b>	<b>Rp148,440,000</b>	<b>Rp0</b>	<b>100.00%</b>
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp132,670,000	Rp132,670,000	Rp0	100.00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp8,790,000	Rp8,790,000	Rp0	100.00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp2,250,000	Rp2,250,000	Rp0	100.00%
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp4,730,000	Rp4,730,000	Rp0	100.00%
<b>C</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp754,144,630</b>	<b>Rp752,674,220</b>	<b>Rp1,470,410</b>	<b>99.81%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp9,318,700	Rp9,315,000	Rp3,700	99.96%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp71,771,850	Rp70,584,900	Rp1,186,950	98.35%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp146,849,000	Rp146,782,000	Rp67,000	99.95%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp102,237,900	Rp102,232,000	Rp5,900	99.99%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp423,967,180	Rp423,760,320	Rp206,860	99.95%
<b>D</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp128,297,450</b>	<b>Rp121,887,700</b>	<b>Rp6,409,750</b>	<b>95.00%</b>

	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp41,300,000	Rp39,250,000	Rp2,050,000	95.04%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp43,442,450	Rp39,082,700	Rp4,359,750	89.96%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp12,200,000	Rp12,200,000	Rp0	100.00%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp31,355,000	Rp31,355,000	Rp0	100.00%
<b>E</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp147,672,500</b>	<b>Rp139,840,675</b>	<b>Rp7,831,825</b>	<b>94.70%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp127,962,500	Rp123,980,675	Rp3,981,825	96.89%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp15,860,000	Rp15,860,000	Rp0	100.00%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp3,850,000	Rp0	Rp3,850,000	0.00%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Rp255,445,000</b>	<b>Rp246,777,401</b>	<b>Rp8,667,599</b>	<b>96.61%</b>
<b>F</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Rp120,692,000</b>	<b>Rp120,636,000</b>	<b>Rp56,000</b>	<b>99.95%</b>
1	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp31,847,000	Rp31,847,000	Rp0	100.00%
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp38,440,000	Rp38,384,000	Rp56,000	99.85%
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp50,405,000	Rp50,405,000	Rp0	100.00%
<b>G</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp134,753,000</b>	<b>Rp126,141,401</b>	<b>Rp8,611,599</b>	<b>93.61%</b>
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp27,788,000	Rp27,447,200	Rp340,800	98.77%
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Rp25,905,000	Rp25,755,360	Rp149,640	99.42%
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp81,060,000	Rp72,938,841	Rp8,121,159	89.98%
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Rp1,245,729,500</b>	<b>Rp1,197,416,179</b>	<b>Rp48,313,321</b>	<b>96.12%</b>
<b>H</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Rp371,380,000</b>	<b>Rp344,990,531</b>	<b>Rp26,389,469</b>	<b>92.89%</b>
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp107,672,000	Rp101,211,473	Rp6,460,527	94.00%
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Rp22,810,000	Rp22,575,000	Rp235,000	98.97%

	<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	2	3	4	5	6
	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				
3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp218,088,000	Rp199,864,058	Rp18,223,942	91.64%
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp22,810,000	Rp21,340,000	Rp1,470,000	93.56%
<b>I</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Rp369,882,800</b>	<b>Rp356,411,272</b>	<b>Rp13,471,528</b>	<b>96.36%</b>
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp175,916,900	Rp175,869,677	Rp47,223	99.97%
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp21,172,800	Rp21,022,800	Rp150,000	99.29%
3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp160,855,100	Rp147,685,795	Rp13,169,305	91.81%
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp11,938,000	Rp11,833,000	Rp105,000	99.12%
<b>J</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Rp504,466,700</b>	<b>Rp496,014,376</b>	<b>Rp8,452,324</b>	<b>98.32%</b>
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp308,473,500	Rp302,131,900	Rp6,341,600	97.94%
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp21,395,400	Rp20,045,400	Rp1,350,000	93.69%
3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp153,410,000	Rp152,706,276	Rp703,724	99.54%
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp21,187,800	Rp21,130,800	Rp57,000	99.73%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Rp440,310,500</b>	<b>Rp278,462,097</b>	<b>Rp161,848,403</b>	<b>63.24%</b>
<b>K</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Rp112,500,000</b>	<b>Rp1,820,000</b>	<b>Rp110,680,000</b>	<b>1.62%</b>
<b>1</b>	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp112,500,000	Rp1,820,000	Rp110,680,000	1.62%
<b>L</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Rp16,046,000</b>	<b>Rp12,810,000</b>	<b>Rp3,236,000</b>	<b>79.83%</b>

	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Rp16,046,000	Rp12,810,000	Rp3,236,000	79.83%
<b>M</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Rp16,046,000</b>	<b>Rp15,731,000</b>	<b>Rp315,000</b>	<b>98.04%</b>
1	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp16,046,000	Rp15,731,000	Rp315,000	98.04%
<b>N</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Rp295,718,500</b>	<b>Rp248,101,097</b>	<b>Rp47,617,403</b>	<b>83.90%</b>
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp224,947,000	Rp196,437,517	Rp28,509,483	87.33%
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Rp70,771,500	Rp51,663,580	Rp19,107,920	73.00%

## BAB IV PENUTUP

Tahun 2022 merupakan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun ke 4 (empat) Bappeda Litbang Kota Bima dari Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2018-2023. Capaian kinerja yang berhasil pada tahun 2022 tidak terlepas dari kerja sama dan partisipasi semua pihak. Berdasarkan uraian penyajian evaluasi kinerja pada Bab III dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran strategis Bappeda Litbang meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator indeks kualitas operencanaan pembangunan daerah pada tahun 2022 adalah sebesar 124,55% dengan kriteria capaian “Sangat Tinggi”. Capaian tersebut meningkat sebesar 13,92% dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 110,63%.
2. Efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Bappeda Litbang pada tahun 2022 mencapai 29,21%
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat, dan instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih belum sepenuhnya dinput oleh setiap perangkat daerah secara tepat waktu.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas

# **HALAMAN LAMPIRAN**



**CASCADING TAHUN ANGGARAN 2022**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA**

MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	FORMULA	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	$(0,5(\text{capaian sasaran RPJMD})+0,3(\text{sasaran perangkat daerah})+0,2(\text{sasaran program daerah})\times 100$  Penjelasan : Formulasi perhitungan target indikator kinerja ini didukung oleh penyajian data rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bima setiap tahunnya, kemudian rata-rata capaian indikator kinerja utama Organisasi Perangkat Daerah dan rata-rata capaian indikator program seluruh perangkat daerah	78.97	1  PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja setiap sektor	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Rata-rata capaian target sasaran RPJMD, sasaran Perangkat daerah dan program sektor pemerintahan dan pembangunan manusia  Data: **Capaian target sasaran RPJMD sektor PPM, Capaian sasaran Perangkat daerah sektor PPM, Capaian program sektor PPM	78.97	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terwujudnya Keselarasan target kinerja dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Manusia	Persentase Keselarasan target kinerja dalam dokumen program/kegiatan/Su b kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Angka Kumulatif	78.97%			Rp371,380,000
													Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Angka Kumulatif	8 OPD		Rp107,672,000	
													Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Angka Kumulatif	8 OPD		Rp22,810,000	
													Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Angka Kumulatif	8 OPD		Rp218,088,000	
													Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Angka Kumulatif	8 OPD		Rp22,810,000	
										Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rata-rata capaian target sasaran RPJMD, sasaran Perangkat daerah dan program sektor perekonomian dan sumber daya alam  Data: **Capaian sasaran RPJMD daerah sektor perekonomian dan Sumber daya Alam, Capaian sasaran Perangkat daerah sektor perekonomian dan Sumber Daya Alam, Capaian Program sektor perekonomian dan Sumber Daya Alam	78.97	2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terwujudnya Keselarasan target kinerja dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan sumber daya alam	Persentase Keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Angka Kumulatif	79%			Rp369,882,800
													Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Angka Kumulatif	5 OPD		Rp175,916,900	



MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	FORMULA	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita acara musrenbang kabupaten/kota	Angka Kumulatif	1 berita acara	Rp38,440,000
														Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen RKPD 2023 Kota Bima	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Angka Kumulatif	2 Dokumen	Rp50,405,000
										Persentase hasil evaluasi dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	$(\text{Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang tepat/jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun}) \times 100\%$	78.97	2 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya tindaklanjut atas rekomendasi hasil dan evaluasi	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	Angka Kumulatif	79%	Rp134,753,000	
														Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi capaian IKU Kota Bima 2022	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Angka Kumulatif	2 laporan	Rp27,788,000
														Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Terlaksananya dan evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	Angka Kumulatif	1 laporan	Rp25,905,000
														Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya dan Evaluasi capaian IKU Perangkat daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Angka Kumulatif	4 laporan	Rp81,060,000
								PROGRAM PENELITIAN 3 DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang	Tingkat Manfaat Penelitian dan Pengembangan	$i = \frac{\sum \text{penelitian yang sudah ditindaklanjuti}}{\sum \text{penelitian yang dilakukan}} \times 100\%$	100%	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Adanya tindaklanjut atas rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Angka Kumulatif	100%	Rp112,500,000	
											$i = \frac{\sum \text{penelitian yang sudah ditindaklanjuti}}{\sum \text{penelitian yang dilakukan}} \times 100\%$			Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbang dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Angka Kumulatif	1 dokumen	Rp112,500,000
														2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Adanya tindaklanjut atas rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan	Angka Kumulatif	100%	Rp16,046,000
														Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Angka Kumulatif	1 Dokumen	Rp16,046,000
														3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Adanya tindaklanjut atas rekomendasi hasil dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan	Angka Kumulatif	100%	Rp16,046,000
														Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Angka Kumulatif	1 Dokumen	Rp16,046,000
														Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Inovasi daerah	Persentase peningkatan inovasi daerah	Angka Kumulatif	100%	Rp295,718,500
														Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan	jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan	Angka Kumulatif	1 dokumen	Rp224,947,000

MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	FORMULA	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya diseminasi inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Angka Kumulatif	3 laporan	Rp70,771,500
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Indikator Kinerja layanan Penunjang Perangkat Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	$\frac{\% \text{ persentase capaian indikator Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100\%$	100%	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka Kumulatif	BB	Rp90,003,000
											$\frac{\% \text{ persentase capaian indikator Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100\%$			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Angka Kumulatif	2 dokumen	Rp4,730,000
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Angka Kumulatif	2 dokumen	Rp4,035,100
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil	Angka Kumulatif	2 dokumen	Rp5,550,000
														Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil	Angka Kumulatif	2 dokumen	Rp3,520,000
														Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil	Angka Kumulatif	2 dokumen	Rp8,150,000
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Terlaksananya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Angka Kumulatif	4 Laporan	Rp3,820,000
														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Angka Kumulatif	2 Laporan	Rp60,197,900
													2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	Angka Kumulatif	100%	Rp3,961,135,810	
														Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Angka Kumulatif	35 orang	Rp3,812,695,810
														Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi	Angka Kumulatif	4 Dokumen	Rp132,670,000
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan	Angka Kumulatif	1 Laporan	Rp8,790,000
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	Angka Kumulatif	17 Laporan	Rp2,250,000
														Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis	Angka Kumulatif	1 dokumen	Rp4,730,000
													3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	Persentase pemenuhan layanan Administrasi	Angka Kumulatif	100%	Rp754,144,630	
														Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Angka Kumulatif	1 paket	Rp9,318,700
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor	Angka Kumulatif	12 bulan	Rp71,771,850
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	Angka Kumulatif	12 paket	Rp146,849,000

MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	FORMULA	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Angka Kumulatif	12 paket	Rp102,237,900
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Angka Kumulatif	24 laporan	Rp423,967,180
													4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya layanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka Kumulatif	100%	Rp128,297,450	
														Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Angka Kumulatif	4 laporan	Rp41,300,000
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Angka Kumulatif	12 laporan	Rp43,442,450
														Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Angka Kumulatif	1 laporan	Rp12,200,000
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Angka Kumulatif	1 laporan	Rp31,355,000
														5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terpenuhinya kebutuhan pemanfaatan barang milik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang	Angka Kumulatif	100%	Rp147,672,500
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Angka Kumulatif	2 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda 2	Rp127,962,500
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Angka Kumulatif	5 unit laptop dan 2 Pc	Rp15,860,000
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilit	Angka Kumulatif	1 unit	Rp3,850,000


  
 KOTA BIMA, 14 JANUARI 2022  
 KEPALA BAPPEDA LITBANG,  
 Dr. H. M. M. M. FAKHRUNRAJI, ME  
 NI 19.808281992031010

**CASCADING TAHUN ANGGARAN 2023**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BIMA**

MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	FORMULA	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	$(0.5(\text{capaian sasaran RPJMD})+0.3(\text{sasaran perangkat daerah})+0.2(\text{sasaran program daerah})\times 100$  Penjelasan : Formulasi perhitungan target indikator kinerja ini didukung oleh penyajian data rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bima setiap tahunnya, kemudian rata-rata capaian indikator kinerja utama Organisasi Perangkat Daerah dan rata-rata capaian indikator program seluruh perangkat daerah	80	1  PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja setiap sektor	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Rata-rata capaian target sasaran RPJMD, sasaran Perangkat daerah dan program sektor pemerintahan dan pembangunan manusia  Data: **Capaian target sasaran RPJMD sektor PPM, Capaian sasaran Perangkat daerah sektor PPM, Capaian program sektor PPM	80.00	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Terwujudnya Keselarasan target kinerja dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Manusia	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	80%	593,760,000.00
														Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8 OPD	135,303,000.00
														Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	8 OPD	84,639,000.00
														Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 OPD	316,015,000.00
														Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 OPD	57,803,000.00
										Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rata-rata capaian target sasaran RPJMD, sasaran Perangkat daerah dan program sektor perekonomian dan sumber daya alam  Data: **Capaian sasaran RPJMD daerah sektor perekonomian, Capaian sasaran Perangkat daerah sektor perekonomian, Capaian Program sektor perekonomian	80	2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Terwujudnya Keselarasan target kinerja dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan sumber daya alam	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	80%	580,260,600.00
														Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 OPD	259,294,900.00
														Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 OPD	21,172,800.00
														Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 OPD	279,769,900.00

MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	FORMULA	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
														Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 OPD	20,023,000.00
										Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	Rata-rata capaian target sasaran RPJMD, sasaran Perangkat daerah dan program sektor infrastruktur dan kewilayahan	80	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Terwujudnya Keselarasan target kinerja dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan	80%	611,193,200.00
										Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	Data: **Capaian target sasaran RPJMD sektor fisik, Capaian sasaran Perangkat daerah fisik, Capaian program sektor fisik dan kewilayahan			Asistensi Penyusunan Dokumen dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah yang Mendapatkan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 OPD	256,185,420.00
														Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 OPD	69,201,400.00
														Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 OPD	262,098,580.00
														Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 OPD	23,707,800.00
								2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUN	Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah	80	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan NSPK (Normal standar pedoman Ketentuan)	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	80%	582,892,000.00
											Data:**Capaian target sasaran perangkat daerah, Capaian program perangkat daerah			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi publik	Jumlah Berita Acara Kesepakatan dan Hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2024-2029	2 berita acara	35,582,700.00
														Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita Acara forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah	1 berita acara	31,847,000.00
														Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita acara musrenbang kabupaten/kota	1 berita acara	212,885,500.00
														Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/kota	Tersusunnya dokumen RKPD 2023 Kota Bima	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	2 Dokumen	302,576,800.00
										Persentase hasil evaluasi dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	(Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang tepat/jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun) x 100%	80	2 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan Daerah		Adanya Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Evaluasi	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	80%	134,753,000.00

MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	FORMULA	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
														Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi capaian IKU Kota Bima 2022	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2 laporan	27,788,100.00
														Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	1 laporan	25,904,900.00
														Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi capaian IKU Perangkat daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4 laporan	81,060,000.00
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Indikator Kinerja layanan Penunjang Perangkat Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	$\frac{\sum \text{persentase capaian indikator Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100\%$	80%	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	128,389,000.00	
														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Rp4,730,000
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	2 dokumen	Rp4,055,100
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi	2 dokumen	Rp5,500,000
														Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	2 dokumen	Rp3,490,000
														Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi	2 dokumen	Rp8,350,000
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi PD dan Prognosis	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi	4 Laporan	Rp3,800,000
														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	2 Laporan	Rp98,463,900
														2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,988,652,194.00
														Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 orang	3,822,137,194
														Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 Dokumen	123,300,000
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	13,140,000
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan	17 Laporan	19,250,000
														Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi	1 dokumen	10,825,000
														3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	869,263,700.00
														Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9,318,700.00

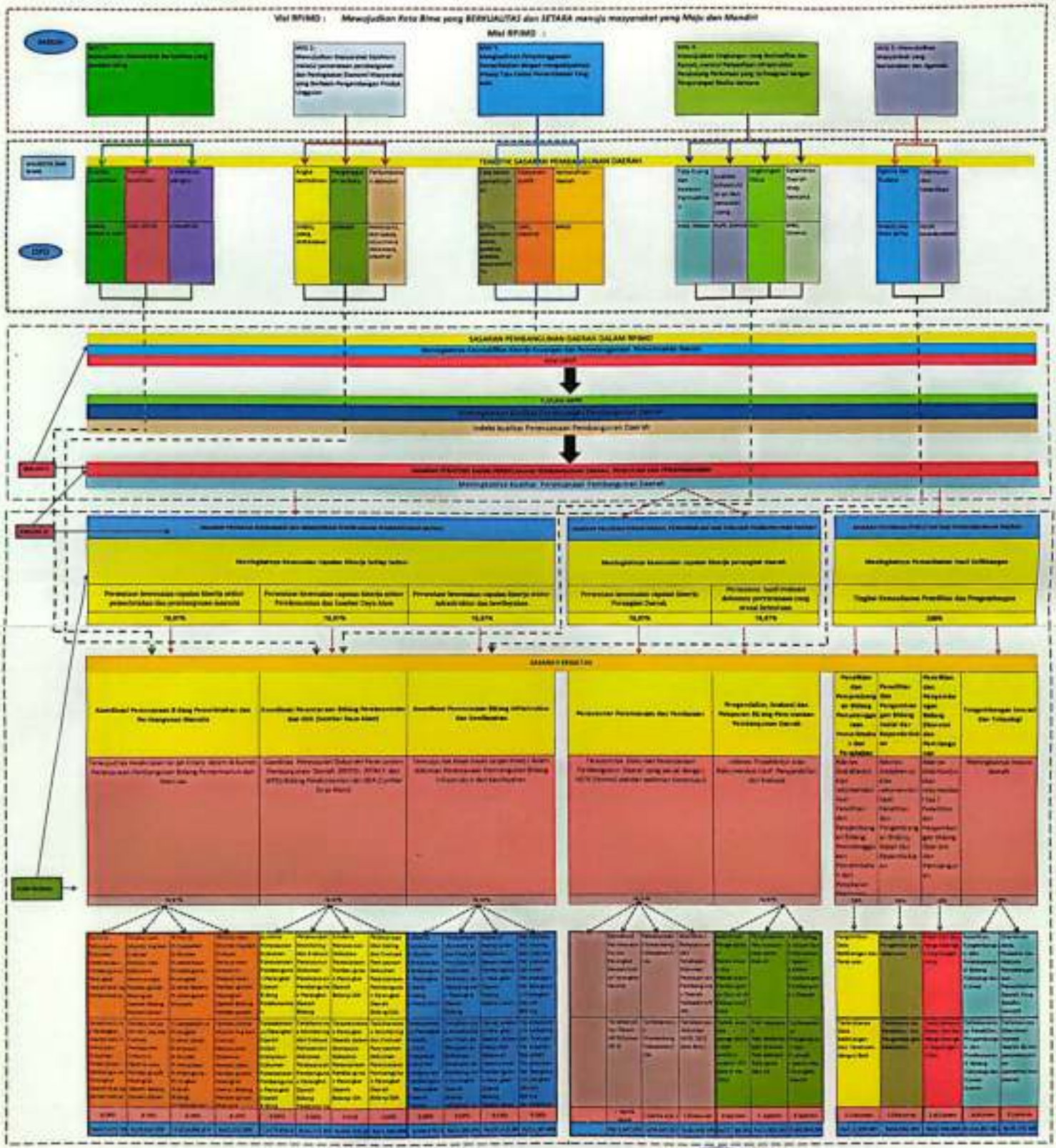


MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	FORMULA	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	318,560,200.00
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	129,806,000.00
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	102,628,800.00
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	308,950,000.00
													4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya layanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	160,544,200.00	
														Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	69,000,000.00
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	47,614,200.00
														Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	12,200,000.00
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	31,730,000.00
													5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pemanfaatan barang milik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	121,537,000.00	
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda 2	60,177,000.00
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	5 unit laptop dan 2 Pc	11,360,000.00
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	50,000,000.00

KOTA BIMA, 5 JANUARI 2023  
KEPALA BAPPEDA,

**Drs H MUHAMMAD FAKHRUNRAJI, ME**  
NIP. 196808281992031010

PROSES BISNIS ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA TAHUN 2022







**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

*Jln. Soekarno-Hatta No. 02 Telp/Fax (0374) 44088 Raba-Bima*

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA**  
**NOMOR : 050/ 14 /BAPPEDA LITBANG / III / 2021**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KOTA BIMA**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KOTA BIMA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah Kota Bima setiap Perangkat Daerah dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- b. bahwa penetapan indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah mengacu kepada rumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta indikator kinerja sasaran rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan telah dilakukan perubahan mengikuti perubahan peraturan daerah Kota Bima tentang rencana pembangunan jangka menengah Kota Bima tahun 2018-2023
- d. berdasarkan poin a,b dan c maka dipandang perlu menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.51 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4365);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raba - Bima  
Pada Tanggal : 17 Maret 2021



**Drs. H Muhammad Fakhrunraji, ME**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680828 199203 1 010

- Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada:
1. Walikota Bima di Raba-Bima ;
  2. Sekretaris Daerah Kota Bima;
  3. Inspektur Kota Bima di Raba-Bima;
  4. Arsip

## 6. LAMPIRAN

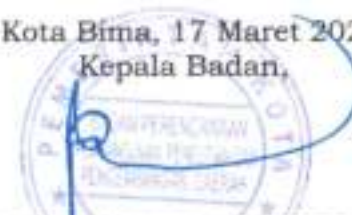
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA

NOMOR 14 TAHUN 2021

## PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA TAHUN 2021-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	$(0,5(\text{capaian sasaran RPJMD})+0,30(\text{sasaran Perangkat Daerah})+0,20 (\text{sasaran program daerah})\times 100$ Penjelasan: <i>Formulasi perhitungan target indikator kinerja ini didukung oleh penyajian data rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bima setiap tahunnya, kemudian rata-rata capaian indikator kinerja utama Organisasi Perangkat Daerah dan rata-rata capaian indikator program seluruh perangkat daerah</i>	BAPPEDA LITBANG

Kota Bima, 17 Maret 2021  
Kepala Badan,**Drs. H MUHAMMAD FAKHRUNRAJI, ME**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680828 199203 1 010





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KOTA BIMA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**N a m a** : **Drs. H. MUHAMMAD. FAKHRUNRAJI, M.E**

**Jabatan** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bima  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

**N a m a** : **H. MUHAMMAD LUTFI, SE**

**Jabatan** : Walikota Bima  
(selaku Atasan Pihak Pertama)

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua,  
**H. MUHAMMAD LUTFI, SE**

Kota Bima, Januari 2022  
Pihak Pertama,  
  
**Drs. H. MUHAMMAD. FAKHRUNRAJI, ME**  
NIP. 680828-199203 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN KOTA BIMA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah</b>			
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	78,97%
<b>B. Sasaran Program/Capaian Program</b>			
1.	Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja setiap sektor	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	78,97%
		Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam	78,97%
		Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	78,97%
2.	Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	78,97%
		Persentase hasil evaluasi dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	78,97%
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	38%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1,245,729,500	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 255,445,000	APBD
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 440,310,500	APBD
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp 1,941,485,000</b>	

  
 Walikota Bima,  
H. MUHAMMAD LUTFI, SE

Kota Bima, Januari 2022  
 Kepala Bappeda Litbang  
 Kota Bima,  
  
Drs. H. MUHAMMAD FAKHRUNRAJI, ME  
 NIP. 19660828 199203 1 010

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BIMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Program	Indikator Program	Target tahunan	Realisasi				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Realisasi				Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target		REALISASI				ANGGARAN (Rp.)
							Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV				Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV			Satuan	Nilai	Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	78,97%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	78,97%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan	78,97%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	OPD	8	8	8	8	8	107672000
																		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	OPD	8	8	8	8	8	22.810.000,00
																		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	8	8	8	8	8	218.088.000,00
																		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	8	8	8	8	8	22.810.000,00
2					Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam	78,97%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya	78,97%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	OPD	5	5	5	5	5	175.916.900,00
																		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	OPD	5	5	5	5	5	21.172.800,00
																		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	OPD	3	3	3	3	3	160.855.100,00
											0		0					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	OPD	3	3	3	3	3	11.938.000,00



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Program	Indikator Program	Target tahunan	Realisasi				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Realisasi				Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target		REALISASI				ANGGARAN (Rp.)
							Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV				Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV			Satuan	Nilai	Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
					Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	78,97%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan	78,97%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	OPD	5	5	5	5	5	308.473.500,00
																		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	OPD	5	5	5	5	5	21.395.400,00
																		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	OPD	5	5	5	5	5	153.410.000,00
																		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	OPD	5	5	5	5	5	21.187.800,00
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	78,97%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	78,97%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita Acara forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah	Berita acara	1	1				31.847.000,00
																		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita acara musrenbang kabupaten/kota	Berita acara	1	1				38.440.000,00
																		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2		2			50.405.000,00
5					Persentase hasil evaluasi dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	78,97%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil movev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	78,97%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Laporan	2		1		1	27.788.000,00
																		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	Laporan	1					25.905.000,00
																		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Laporan	4	1	1	1	1	81.060.000,00
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	38%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	100%	-	-	-	100%	Pengelolaan Data Kelitbitangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbitangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Dokumen	1				1	112.500.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Program	Indikator Program	Target tahunan	Realisasi				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Realisasi				Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target		REALISASI				ANGGARAN (Rp.)	
							Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV				Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV			Satuan	Nilai	Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
											Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	100%	-	-	-	100%	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen				1			16.046.000,00
											Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	100%	-	-	-	100%	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1				1		16.046.000,00
											Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan inovasi daerah	100%	-	-	-	100%	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi	Dokumen	1			1			224.947.000,00
																		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Laporan	3	0	1	1	1		70.771.500,00



**MONEV ATAS RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022 BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BIMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Program	Indikator Program	Target tahunan	Capaian				Penjelasan atas capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Capaian				Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target		Capaian				Penjelasan atas capaian
							Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV					Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV			Satuan	Nilai	Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	78,97%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	78,97%				100,39% dan 105,32	100,39% adalah capaian untuk sektor pemerintahan dan 105,32 adalah capaian sektor pembangunan manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan	78,97%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	OPD	8	8	8	8	8	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
																			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	OPD	8	8	8	8	8	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
																			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	8	8	8	8	8	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
																			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	8	8	8	8	8	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
2					Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam	78,97%				(95,97+85,71%)	95,97% capaian sektor perekonomian dan 85,71 capaian sektor sumber daya alam	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya	78,97%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	OPD	5	5	5	5	5	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Program	Indikator Program	Target tahunan	Capaian				Penjelasan atas capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Capaian				Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target		Capaian				Penjelasan atas capaian	
							Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV					Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV			Satuan	Nilai	Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
																			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	OPD	5	5	5	5	5	5	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
																			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	OPD	3	3	3	3	3	3	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
												0	0						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	OPD	3	3	3	3	3	3	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
					Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	78,97%				103,75%		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan	78,97%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	OPD	5	5	5	5	5	5	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
																			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	OPD	5	5	5	5	5	5	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Program	Indikator Program	Target tahunan	Capaian				Penjelasan atas capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Capaian				Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target		Capaian				Penjelasan atas capaian
							Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV					Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV			Satuan	Nilai	Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
																			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	OPD	5	5	5	5	5	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
																			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	OPD	5	5	5	5	5	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	78,97%				100,00%		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	78,97%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita Acara forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah	Berita acara	1	1			Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja	
																			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita acara musrenbang kabupaten/kota	Berita acara	1	1			Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja	
																			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2		2		Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Program	Indikator Program	Target tahunan	Capaian				Penjelasan atas capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Capaian				Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target		Capaian				Penjelasan atas capaian
							Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV					Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV			Satuan	Nilai	Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5					Persentase hasil evaluasi dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	78,97%				100,00%		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil money yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	78,97%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Koordinasi Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Laporan	2		1		1	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
																			Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama daerah yang dikordinasikan pelaksanaannya	Laporan	1				Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja	
																			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Laporan	4	1	1	1	1	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	38%	-	-	-	33,00%	ada 1 kegiatan pendukung program yang tidak terealisasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	100%	-	-	-	0%	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Dokumen	1				0	Target kinerja tidak tercapai diakibatkan terlambatnya proses persiapan
												Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	100%	-	-	-	100%	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen			1			Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
												Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	100%	-	-	-	100%	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1				1	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja
												Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan inovasi daerah	100%	-	-	-	100%	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan perekrayasaan dibidang teknologi dan inovasi	Dokumen	1			1		dalam dokumen yang disusun ini terdapat 30 daftar inovasi yang memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian IGA (Inovative government Award)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Program	Indikator Program	Target tahunan	Capaian				Penjelasan atas capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Capaian				Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target		Capaian				Penjelasan atas capaian
							Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV					Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV			Satuan	Nilai	Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
																			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Laporan	3	0	1	1	1	Capaian kinerja yang sesuai dengan target ini tidak terlepas dari adanya evaluasi capaian kinerja per triwulan oleh masing-masing bidang terhadap gambaran data kinerja

